



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EFEKTIVITAS LSM YCAB SEBAGAI MITRA BNN  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KAMPUNG PERMATA**

**TESIS**

**YULI TAMBING  
0906505546**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
JAKARTA JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**EFEKTIVITAS LSM YCAB SEBAGAI MITRA BNN  
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DI KAMPUNG PERMATA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)  
dalam Peminatan Kajian Strategik Penanganan Narkoba Program Studi  
Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana  
Universitas Indonesia**

**YULI TAMBING  
0906505546**

**PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL  
PEMINATAN KAJIAN STRATEGIK PENANGANAN NARKOBA  
JAKARTA JULI 2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh : Yuli Tambing  
Nama : Yuli Tambing  
NPM : 0906505546  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Judul Tesis : Efektivitas LSM YCAB Sebagai Mitra BNN Dalam  
Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Permata

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Fakultas Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Dr. H. Hadiman, SH., MSc  
Penguji : Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi., MM  
Penguji : Drs. Ahwil Lutan, SH., MBA

( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )  
( *[Signature]* )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains (MSi), pada Program Pascasarjana Studi Kajian Ketahanan Nasional Konsentrasi Kajian Strategik Penanganan Narkoba Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

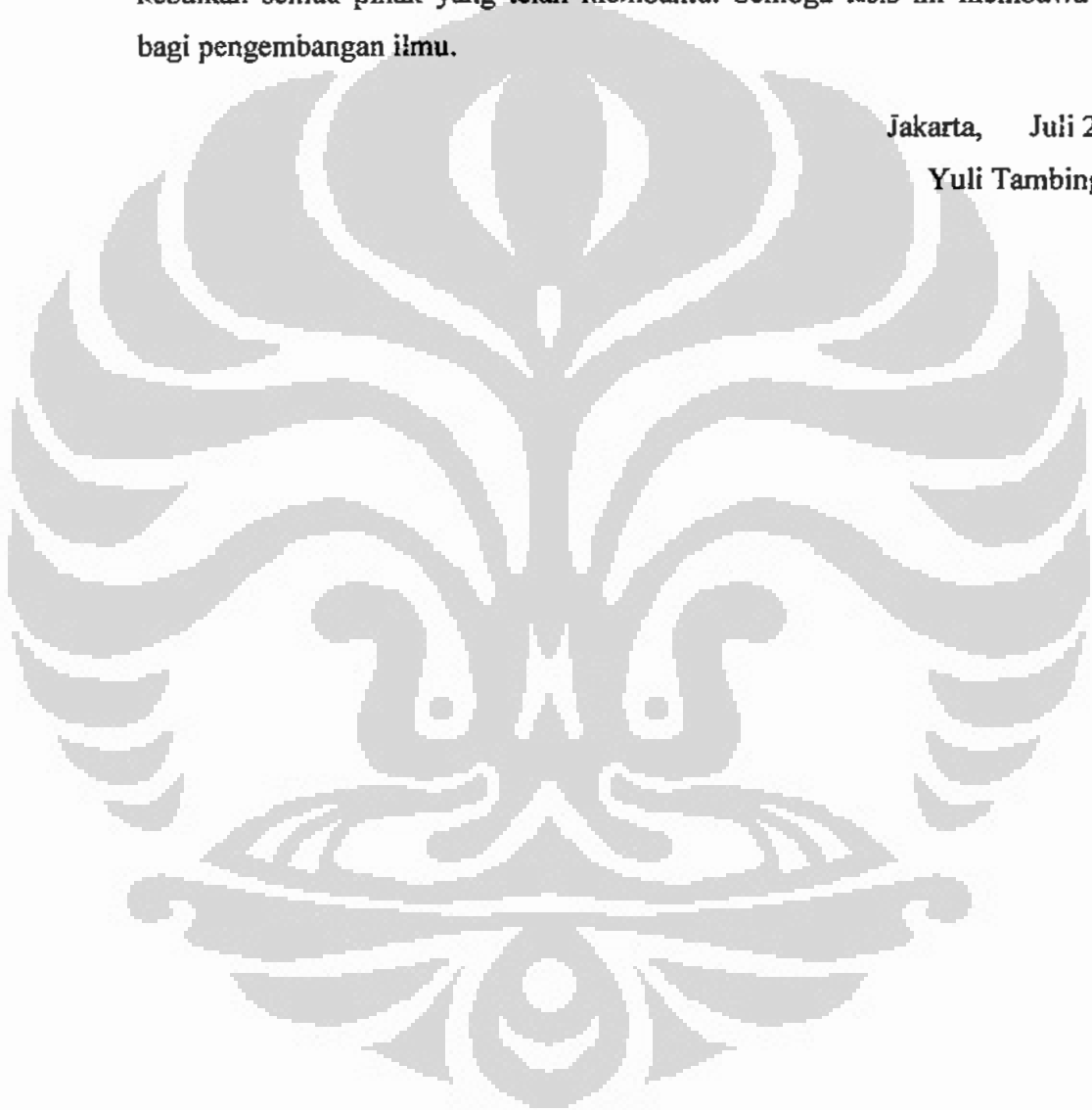
- (1) Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Prof. Dr. Chandra Wijaya, MSi., MM. selaku Ketua Sidang Tesis;
- (3) Komjen Pol (Pur) Drs. Ahwil Lutan, SH., MBA. selaku Penguji Tesis;
- (4) Komjen (Pol) Drs. Gories Mere selaku Kepala Badan Narkotika Nasional;
- (5) Brigjen (Pol) dr. Muhammad Aidy Rawas selaku Plt. Deputi Pemberdayaan Masyarakat;
- (6) Brigjen (Pol) Drs. Nicholaus Eko, Pg.D, MSc, selaku Kepala Biro Perencanaan BNN yang telah banyak memberikan arahan-arahan sebelum dimulainya penulisan tesis ini;
- (7) Prof. Dr. Ronni R Nitibaskara, selaku Ketua Program Studi Kajian Ketahanan Nasional;
- (8) Agus Suparja, SH, Yulinda Pangabea selaku staf YCAB, Ibu Shenda Lohy dan Agnes Pattiwael selaku fasilitator Kampung Permata yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan; dan
- (9) Orang tua, Kakak, Laura Dessy Sagita, dan Agatha Levina Tambing, terima kasih untuk doa, kesabaran dan dukungannya;
- (10) Staf Sekretariat Program Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional;

(11) Pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis haturkan terima kasih.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, Juli 2011

Yuli Tambing



## ABSTRAK

Nama : Yuli Tambing  
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional  
Judul : Efektivitas LSM YCAB Sebagai Mitra BNN Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Permata

Tesis ini membahas mengenai efektivitas LSM YCAB dalam bermitra dengan BNN melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada daerah yang menjadi sasaran program P4GN, yaitu Kampung Permata. Mengingat masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah atau dalam hal ini BNN semata. Diperlukan keterlibatan LSM dalam melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat pada pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. BNN memandang penting peran LSM dalam upaya mendorong peran serta masyarakat guna menciptakan lingkungan bebas Narkoba sebagaimana telah dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi BNN.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian yang didapat menyarankan bahwa dalam hal kemitraan antara BNN dan LSM YCAB pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Permata, hendaknya kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, tepat pada seluruh sasaran, dapat menciptakan daya tarik dan motivasi bahwa kegiatan tersebut membawa nilai manfaat dan keuntungan, dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat, serta peka terhadap permasalahan tuntutan ekonomi yang ada pada masyarakat dengan menciptakan solusi-solusi yang tepat dalam mengatasi persoalan ekonomi tersebut. Diharapkan melalui hal-hal tersebut, dapat terwujud kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba.

Kata Kunci :

Efektivitas, Kemitraan BNN dan LSM, Pemberdayaan Masyarakat

## ABSTRACT

Name : Yuli Taming  
Study Program : National Security Studies  
Title : The Effectiveness of YCAB NGO in Cooperation With BNN  
for Community Empowerment in the Permata Village

This thesis discusses the effectiveness of YCBA NGO in partnership with BNN through community empowerment activities in the areas that were targeted by P4GN program, the Permata Village. Given the problem of abuse and illicit drugs is not only the responsibility of the government or in this case BNN. The involvement of NGOs are required in conducting extension and intensification of community on the prevention and eradication of illicit drug abuse through the strategy undertaken by encouraging community participation in creating drug-free environment. BNN thinks that it is an important role of NGOs in an effort to encourage community participation in order to create a drug-free environment, as already stated in the policy direction and strategy of BNN

This study is a qualitative research by generating descriptive data. The results obtained suggest that in terms of partnerships between YCBA NGO and BNN in the effort of community empowerment activities conducted in Kampung Permata, the activities carried out should be sustain, appropriate to the entire target, can create attraction and motivation that the activity brings profits and benefits, can explore and develop the potential that exists in society, and sensitive to the economic demands of the problems that exist in society by creating the right solutions to overcome these economic problems. Hopefully, through these things, community empowerment activities can be realized in accordance with the policy direction and strategy of BNN, which encourage community participation in creating drug-free environment.

**Key words:**

Effectivity, Partnership between BNN and NGO, Community Empowerment

## DAFTAR ISI

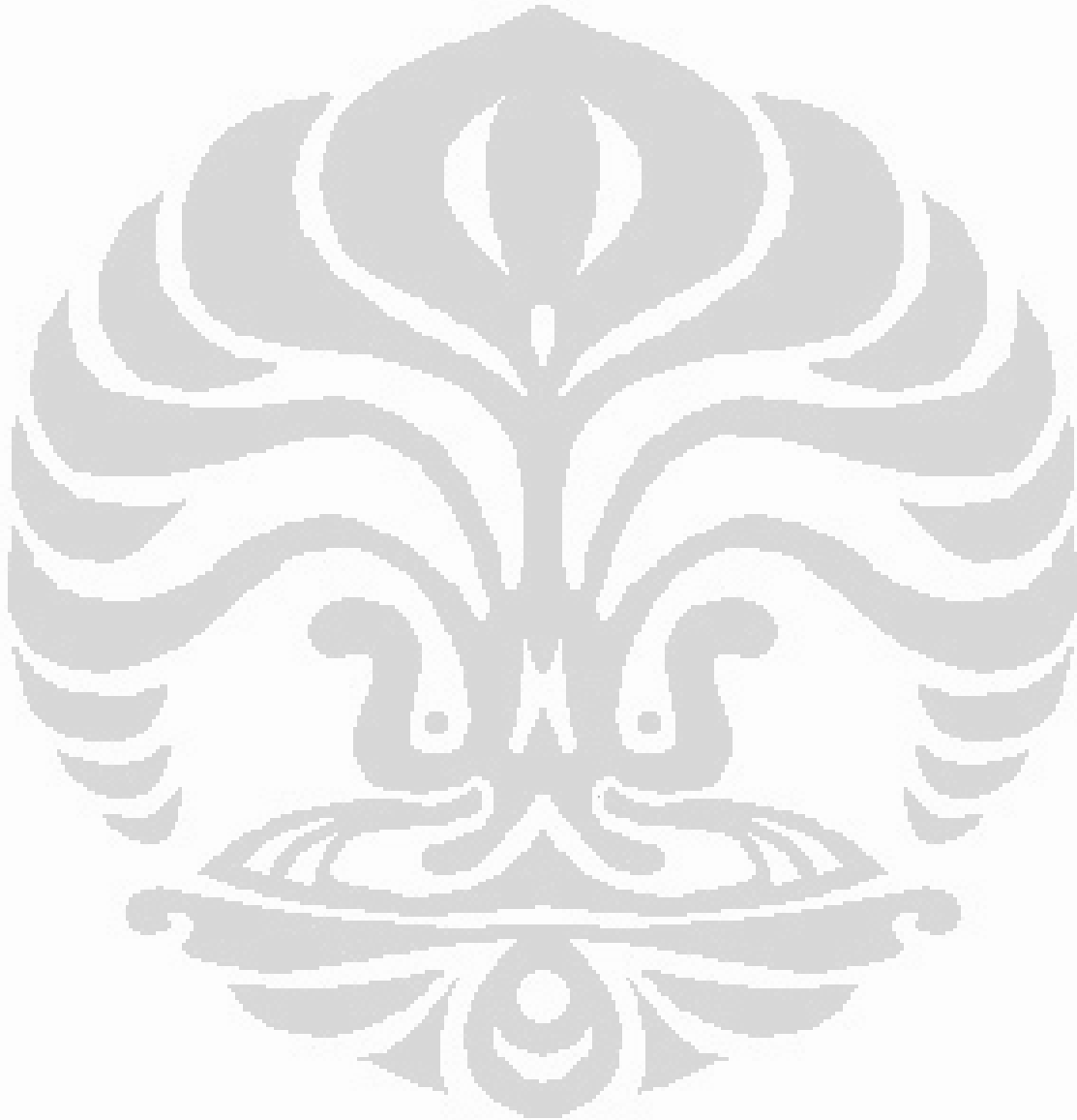
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
<b>1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.1.1 Trend Global Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba .....	1
1.1.2 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Indonesia .....	3
1.2 Perumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16
1.4 Manfaat Penelitian .....	17
1.5 Tata Urut Penulisan .....	17
<b>2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
2.1 Pemberdayaan Masyarakat .....	19
2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan .....	19
2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan .....	24
2.2 Kemampuan Seorang Manajer .....	27
2.2.1 Menguasai Teori tentang Teknik, Taktik dan Strategi di Bidangnya (komunikasi) .....	27
2.2.2 Memahami Kemampuan Communication and Relation .....	37
2.2.3 Peka pada Lingkungannya baik Eksternal dan Internal .....	40
2.3 Teori tentang Kepemimpinan .....	44
2.3.1 Teori Kepemimpinan Sifat .....	44
2.3.2 Teori Kepemimpinan Perilaku dan Situasi .....	45
2.3.3 Teori Humanistik .....	45
2.4 Teori tentang Komunikasi .....	46
2.4.1 Teori Behaviorisme .....	46
2.4.2 Teori Humanisme .....	47
2.4.3 Teori Uses and Gratifications (Kegunaan dan Kepuasan) .....	48
2.5 Teori tentang Manajemen .....	48
2.5.1 Teori Manajemen Klasik .....	48
2.5.2 Teori Tingkah Laku Manajemen .....	52
2.5.3 Teori Kemungkinan dalam Manajemen .....	53
2.6 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah .....	54
2.6.1 Sejarah .....	54
2.6.2 Visi dan Misi .....	58
2.6.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) .....	58



<b>3. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>63</b>
3.1 Sejarah Berdirinya Yayasan Cinta Anak Bangsa .....	63
3.2 Visi dan Misi serta Nilai-nilai yang dianut YCAB .....	64
3.3 Strategi YCAB dalam P4GN .....	65
<b>4. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
4.1 Pendekatan Penelitian .....	68
4.2 Lokasi Penelitian .....	69
4.3 Sumber Data .....	69
4.4 Teknik Pengumpulan Data .....	70
4.5 Teknik Analisis Data .....	71
4.6 Operasionalisasi Faktor-faktor yang akan Diteliti .....	72
<b>5. HASIL PEMBAHASAN .....</b>	<b>74</b>
5.1 Eksistensi Program-program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Daerah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba .....	78
5.2 Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ideal .....	90
5.3 Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat .....	92
<b>6. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>94</b>
6.1. Kesimpulan .....	94
6.2. Saran .....	95
<b>DAFTAR REFERENSI .....</b>	<b>97</b>

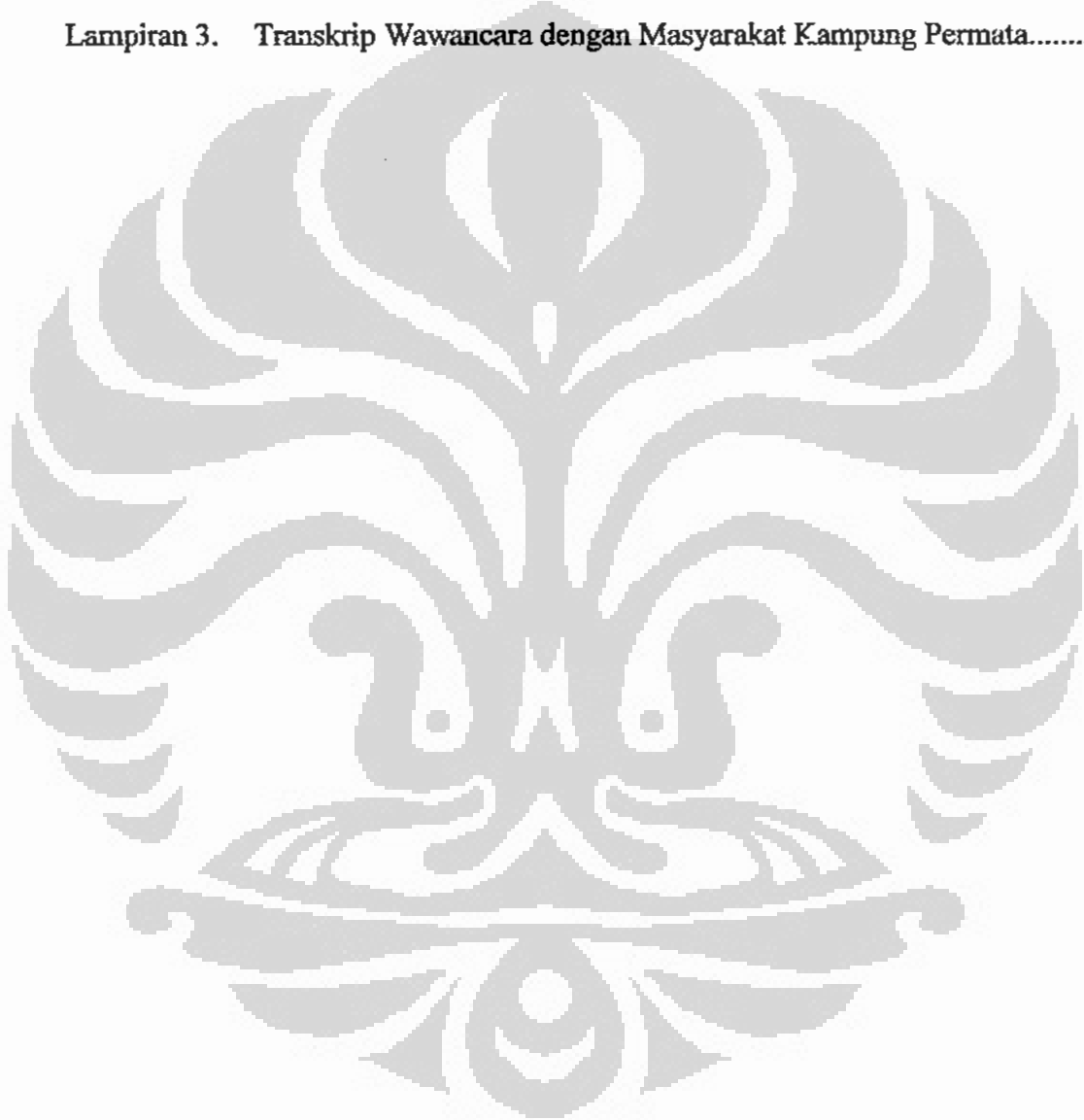
## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Operasionalisasi Faktor-faktor Yang Akan Diteliti .....	101
Tabel 4.2.	Pedoman Wawancara .....	102



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara dengan Staf LSM YCAB .....	107
Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan Staf Deputi Pemberdayaan Masyarakat .....	109
Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Masyarakat Kampung Permata.....	111



# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

### 1.1.1 Trend global penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba

Menurut Jurnal Data P4GN (2010) trend global penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saat ini telah menimbulkan ancaman besar bagi kesehatan dan kemanusiaan sehingga mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar bangsa-bangsa di dunia. Upaya pemberantasan dan pengawasan yang lebih ketat terus dilakukan oleh negara-negara di dunia untuk menekan dampak buruk narkoba terhadap berbagai aspek kehidupan manusia: kesehatan, ekonomi, keamanan, dan politik. Apabila tidak ditanggulangi dengan serius, dampak buruk narkoba akan berpotensi mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara akibat hilangnya satu generasi muda bangsa yang berkualitas (*lost generation*).

Upaya pengawasan narkoba yang ketat oleh negara-negara di dunia telah dapat mengendalikan peredaran narkoba di Eropa, Amerika dan Asia. Namun demikian transaksi dan peredaran gelap yang dilakukan oleh pelaku kejahatan terorganisir (*organized crime*) ternyata terus meningkat, sehingga diperlukan berbagai macam upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.

Upaya penegakan hukum harus merubah fokus sasaran dari pecandu Narkoba kepada pengedar/pedagang Narkoba, karena pecandu lebih membutuhkan dukungan dan akses terhadap pelayanan terapi dan rehabilitasi. Pemerintah perlu juga membantu kelompok orang muda yang rentan terhadap masalah Narkoba dan

kriminalitas, dengan peningkatan pendidikan, lapangan kerja dan kegiatan olahraga. Selanjutnya berbagai kesepakatan internasional bersama yang ditetapkan perlu dilaksanakan oleh pemerintah.

Menghadapi kekuatan besar kejahatan terorganisir, pemerintah perlu memahami cara mafia beroperasi, termasuk kejahatan pencucian uang (*money laundering*) oleh pelaku kejahatan narkoba. Kemampuan penegak hukum untuk melakukan investigasi dan penyidikan kejahatan pencucian uang sangat penting, agar aset hasil kejahatan narkoba dapat ditemukan dan disita kembali.

Menurut Jurnal Data P4GN (2010) trend global produksi narkoba menunjukkan penurunan area kultivasi *opium* dan *coca*, tetapi produksi *opium*, heroin dan morphin masih tetap tinggi, khususnya di Afganistan dan Colombia. Estimasi global produksi kokain berkurang 15%. Sementara itu hasil penyitaan opiat cenderung stabil meskipun pada level yang tinggi, penyitaan kokain berkurang. Demikian pula harga dan tingkat kemurian kokain berkurang.

Masalah global terhadap *Amphetamine Type Stimulant* (ATS) semakin memburuk. Produksi dan peredaran ATS secara global meningkat, demikian pula bahan kimia prekursor ATS meningkat di Amerika Tengah dan Amerika Selatan, yang menyuplai pembuatan ATS untuk diperdagangkan di Amerika Utara.

Trend global konsumsi narkoba menunjukkan penggunaan tertinggi opiat di sepanjang jalur peredaran gelap sekitar Afghanistan. Di Asia dan Eropa, opiat merupakan jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu terapi. Sementara kokain lebih banyak digunakan di Amerika Utara dan Amerika Selatan, dan ATS lebih banyak digunakan di Asia, Oceania, dan Amerika Utara.

Tingkat penggunaan *cannabis* tertinggi di Amerika Utara dan Eropa Barat, meskipun hasil studi menunjukkan kecenderungan berkurangnya penggunaan *cannabis* di negara-negara maju.

Berdasarkan data dari World Drugs Report 2009 yang dikeluarkan oleh United Nations Office on Drug and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa setiap tahunnya negara-negara di seluruh dunia dibanjiri 1.000 ton Heroin, 1.000 ton Kokain, sejumlah besar Ganja, Hashish dan Amphetamine Type Stimulants (ATS). Selain itu jumlah current users di seluruh dunia pada tahun 2005/2006 diperkirakan mencapai sekitar 200 juta orang, dan pada tahun 2006/2007 meningkat menjadi sekitar 208 juta orang. Dengan fakta ini, maka diperkirakan tingkat pertumbuhan penyalahguna Narkoba di dunia telah mencapai 4% per tahun.

### 1.1.2 Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia

Menurut Jurnal Data P4GN BNN (2010) bahwa pola penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia dapat digambarkan melalui menurunnya jumlah kasus dan tersangka narkoba untuk jenis ganja dan heroin sejak tahun 2007. Demikian pula jumlah kasus dan tersangka untuk jenis ekstasi berkurang cukup berarti, dengan penurunan jumlah barang bukti ekstasi yang berhasil disita dari 1.091.204 butir (2008) menjadi 309.382 butir (2009).

Situasi peredaran shabu (*methamphetamine*) terus meningkat sejak tahun 2006, hal tersebut dapat digambarkan dari bertambahnya jumlah kasus dan tersangka jenis shabu dari tahun 2006 dan mencapai level tertinggi pada tahun 2009 (10.742 kasus dan 10.183 tersangka). Hasil penyitaan shabu oleh Ditjen Bea Cukai tahun 2009 juga menunjukkan peningkatan.

Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2009 menyimpulkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa adalah 4,7% atau sekitar 921.695 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 61% menggunakan narkoba jenis analgesik, dan 39% menggunakan jenis ganja, amphetamine, ekstasi dan lem.

Jumlah pecandu narkoba yang mendapatkan pelayanan terapi dan rehabilitasi (T&R) di seluruh Indonesia menurut data Pusat Terapi dan Rehabilitasi (Pus T & R) BNN adalah 17.734 orang, dengan jumlah terbanyak pada kelompok umur 20 s.d. 34 tahun. Jenis narkoba yang paling banyak digunakan oleh pecandu yang mendapatkan pelayanan T & R adalah heroin (10.768 orang), selanjutnya secara berturut-turut adalah jenis ganja (1.774 orang), shabu (984 orang), MDMA, alkohol, amphetamine lain, dan benzodiazepine.

Berdasarkan Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) pada tahun 2008 bahwa sasaran utama peredaran Narkoba adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Dengan populasi yang cukup besar, yaitu sekitar 16,9 juta orang (2008) dan meningkat menjadi 22,3 juta orang (2013). Dengan demikian, mereka merupakan pasar yang amat potensial untuk menjadi target para bandar atau pengedar gelap narkoba, apalagi para pelajar dan mahasiswa se-usia mereka sedang dalam proses penemuan jati diri, sehingga rasa keinginan untuk tahu atau coba-coba merupakan awal dari terjerumusnya mereka dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba.

Menurut Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, bahwa diperkirakan ada sekitar 90% dari kelompok coba pakai Narkoba berasal dari kelompok pelajar/mahasiswa. Bahkan hasil studi menemukan usia-usia pertama kali pakai Narkoba pada

usia 16-18 tahun (41%) atau setara dengan mereka yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA). Tidak hanya para bandar/pengedar Narkoba, mereka yang telah pakai Narkoba secara sadar maupun tidak sadar terus berupaya memperluas jaringan sesama pemakai Narkoba. Dari total responden, ada sebanyak 52% yang mengaku pernah menawarkan Narkoba kepada orang lain, bahkan 31% pernah menjual Narkoba. Sedikitnya 1 dari 10 penyalahguna pernah menjadi kurir narkoba. Penasun adalah kelompok penyalahguna yang paling berisiko menjadi pengedar narkoba, karena hampir separuh (45%) penasun pernah menjual narkoba pada orang lain.

Pabrik gelap Narkoba kini sudah berada di lingkungan perumahan, seperti "pabrik shabu dan ekstasi ternyata sudah berada di lingkungan perumahan, yaitu di apartemen Mediterania, Jakarta Barat (Kompas, 28 Oktober 2008), Perumahan Taman Ratu, Jakarta Barat (Kompas, 22 November 2008) dan di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat (Kompas Online, 12 Januari 2009). Padahal sebelumnya, pabrik ekstasi/shabu yang diungkap kasusnya dibangun di daerah pinggir kota (Bogor, Tangerang dan Serang). Ini mengindikasikan bahwa para bandar berupaya mendekatkan akses dan mencoba menyingkirkan pola yang ada, sehingga pihak Kepolisian atau masyarakat sekitar tidak menyadari keberadaan pabrik shabu/ekstasi tersebut.

Menurut Team Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia bahwa adanya kecenderungan kenaikan penyalahguna Narkoba dari Tahun ke Tahun, yaitu pada tahun 2008, besaran penyalahguna narkoba diperkirakan sekitar 3,11 juta sampai 3,61 juta orang di Indonesia, dengan nilai tengah 3,36 juta orang. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan estimasi tahun 2004, sebesar 3,2 juta orang. Namun perlu diingat, ada perbedaan cara penghitungan metodologi antara tahun 2004 dan 2008. bila



membandingkan angka absolutnya, seolah-olah tidak ada kenaikan jumlah penyalahguna narkoba. Untuk itu, cara perhitungannya perlu disamakan, sehingga hasil datanya dapat diperbandingkan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metodologi yang telah disamakan, diperoleh kisaran jumlah penyalahguna di tahun 2004 antara 2,66 juta sampai 2,94 juta orang penyalahguna narkoba, dengan nilai tengah sebanyak 2,80 juta orang. Diperkirakan ada kenaikan sebanyak 20% jumlah penyalahguna dari tahun 2004 ke 2008. Kenaikan angka penyalahguna ini didukung oleh beberapa fakta, seperti dari hasil survei narkoba di kelompok pelajar/mahasiswa, diketahui angka prevalensi penyalahgunaan narkoba naik dari 3,9% di tahun 2003 (BNN & Pranata UI, 2004) menjadi 5,3% di tahun 2006 (BNN dan Puslitkes UI, 2007). UNODC juga memperkirakan terjadi kenaikan penyalahgunaan Narkoba di seluruh dunia dari 200 juta (2006) menjadi 208 juta orang di tahun 2007 atau terjadi kenaikan sekitar 4%.

Data dari pihak Kepolisian menunjukkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba. Terlihat dari hasil tangkapan dan pengungkapan kasus narkoba dari tahun 2001 sampai 2006 yang menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahunnya. Ada beberapa fakta tentang ini, pertama jumlah kasus pidana narkoba pada tahun 2001 sebanyak 3.478 orang, maka meningkat tajam menjadi 16.252 orang tahun 2006. Dalam 6 tahun terakhir tersebut, kasus pidana terdistribusi atas masalah narkoba 54%, psikotropika 33%, dan bahan adiktif 13%. Kedua, jumlah tersangka kasus narkoba juga meningkat setiap tahun, dari sekitar 5.000 tersangka pada tahun 2001 menjadi sekitar 32.000 tersangka pada tahun 2006. Dalam kurun waktu 2001-2006 jumlah tersangka kasus mencapai sekitar 85.000 orang. Sebagian besar tersangka adalah warga negara Indonesia. Hanya 0,5% tersangka kasus yang warga Negara asing. Ketiga, besaran barang bukti tangkapan narkoba, misalkan lahan ganja yang dihancurkan dari 23 hektar (2001) menjadi 289,6 hektar

(2006). Heroin dari 16.642 gram (2001) menjadi 21.872 gram (2003) dan terus turun menjadi 11.901 gram (2006). Demikian juga dengan psikotropika terjadi peningkatan, misalkan ekstasi dari 90.523 tablet (2001) menjadi 466.907 tablet (2006), atau shabu dari 48.848 gram (2001) melonjak menjadi 1.241.200 gram (2006). Belum lagi pengungkapan beberapa laboratorium clandestine, jika tahun 2001 hanya 1 buah maka di tahun 2006 menjadi 16 buah. Bahkan tahun 2003 berhasil diungkap laboratorium clandestine terbesar di dunia, dan tahun 2005 terbesar ke-2 di dunia setelah Fiji (Dit. IV/Narkoba, Desember 2006).

Selanjutnya Team Laporan Survei Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia menyebutkan bahwa dengan semakin maraknya peredaran narkoba, diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba akan terus meningkat sampai tahun 2013. Terkait dengan hal itu, maka ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu pertama, diperkirakan terjadi kenaikan proporsi jumlah penyalahguna yang lebih tinggi pada periode tahun 2008-2013 dibandingkan 2004-2008. Kedua, adanya peningkatan pola kenaikan proporsi penyalahguna coba pakai dari 24% (2004) menjadi 28% (2013).

Fakta point ke-2 di atas, menunjukkan ada upaya yang keras dan serius dari pihak pengedar/Bandar untuk melakukan penetrasi pasar (mencari penyalahguna baru) pada kelompok coba pakai. Di kelompok coba pakai sekitar 90%-nya adalah kelompok pelajar/mahasiswa di tahun 2008. Secara keseluruhan, jumlah penyalahguna di kelompok pelajar/mahasiswa diperkirakan 4,6% dari total jumlah pelajar/mahasiswa (2008) dan akan mengalami peningkatan hampir dua kali lipatnya (8,8%) di tahun 2013.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, mengingat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek, baik kesehatan, ekonomi, sosial, politik dan keamanan, maka BNN untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka melaksanakan P4GN secara komprehensif dan multidisipliner telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam upaya mendukung pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap II tahun 2010-2015. Adapun arah kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun dan meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
2. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba.
3. Memfasilitasi penyediaan sarana terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba. Strategi yang dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan pelayanan terapi dan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.
4. Memberantas sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba baik dari Luar maupun Dalam Negeri. Strategi yang dilakukan dengan cara memetakan dan mengungkap sindikat jaringan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba serta menyita aset pelaku tindak kejahatan Narkoba.
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Strategi yang dilakukan dengan cara membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi Good Governance di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, dalam penulisan karya ilmiah ini penulis akan memfokuskan pada kajian mengenai upaya melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba, yang dilaksanakan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Peran LSM menjadi sangat penting dalam melaksanakan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya dalam menggerakkan peran serta masyarakat guna menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Mengingat BNN sebagai suatu instansi pemerintah tidak akan mungkin untuk menangani permasalahan yang semakin mengkhawatirkan ini tanpa melibatkan peran serta masyarakat, termasuk LSM di dalamnya.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang ditujukan kepada Gubernur di Seluruh Indonesia, pada Lampiran II Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah Masyarakat Warga Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara dalam Budairi (2002) mengatakan bahwa definisi LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana barangkali bisa diartikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan nilai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan kesadaran dan kemandirian masyarakat, yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia, pengertian LSM memiliki ciri-ciri sebagaimana dikatakan oleh M.M. Billah (1990) adalah pertama, orientasi mereka kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partisipasi rakyat. Ketiga, adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak hubungan silang antar pribadi dan kelembagaan yang saling mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya.

Menurut Morris (2000), LSM di Indonesia dapat dikategorikan sebagai organisasi sektor *non-profit*. Ia melakukan teoritisasi terhadap fenomena LSM dengan mencirikan organisasi sektor non profit tersebut sebagai berikut:

1. Terorganisir (*organized*); terinstitusionalisasi dari sudut bentuk organisasi dari sistem operasinya.
2. Bukan negara (*private*); secara institusional bukan bagian dari negara atau pemerintah.
3. tidak berorientasi profit (*non-profit distributing*); tidak berorientasi menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para direktornya, tetapi mengembalikan pendapatannya untuk kepentingan misinya.
4. Swadaya (*self-governing*); mempunyai sistem untuk mengatur dirinya sendiri.
5. Kesukarelaan (*voluntary*); melibatkan partisipasi sukarela dalam operasi ataupun manajemen organisasi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengingat begitu banyak LSM yang peduli terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, penulis mencoba membatasi ruang lingkup penelitian yaitu pada salah satu LSM yang telah bekerjasama atau bermitra dengan BNN di salah satu daerah yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada Kampung Permata. Adapun LSM tersebut adalah Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCACB).

Dan diharapkan melalui YCAB permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini dapat terjawab.

Peran LSM dan BNN diharapkan dapat mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba, namun pada kenyataannya hubungan kerjasama yang terjalin antara LSM dengan BNN belum berjalan maksimal. Hal tersebut dapat dilihat pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung Permata. Seperti telah disebutkan pada bagian di atas, bahwa Kampung Permata merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran program kegiatan BNN khususnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan LSM YCAB. Adapun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan LSM YCAB adalah berupa kegiatan pelatihan komputer, dimana LSM YCAB merupakan pelaksana dari kegiatan tersebut. Pada umumnya masyarakat menyambut baik, dimana para peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan anak-anak usia sekolah tingkat dasar (SD) maupun remaja (SMP), tetapi untuk Para Pemuda Kampung Permata belum dapat disentuh oleh kegiatan tersebut, mengingat sebagian besar Para Pemuda Kampung Permata terkontaminasi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Mengutip apa yang telah disampaikan oleh Yulinda Pangabean yang merupakan salah satu anggota dari LSM YCAB bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam kegiatan pelatihan komputer yang telah dilaksanakan oleh YCAB belum dapat mengurangi jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, karena dalam kegiatan tersebut tujuannya adalah untuk mencegah anak-anak yang belum terkontaminasi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Kegiatan program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan kepada Kampung Permata baru sebatas diterimanya program-program BNN dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di

daerah tersebut, baik kegiatan yang melibatkan LSM YCAB maupun yang dilaksanakan oleh BNN sendiri. Dimana Masyarakat Kampung Permata menyambut baik dan antusias kepada program-program BNN dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan. Namun, seperti telah disebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan baru mampu menyentuh pada ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak usia sekolah tingkat dasar (SD) dan SMP.

Seperti telah disebutkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan LSM YCAB adalah kegiatan pelatihan komputer, sedangkan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN sendiri adalah kegiatan pelatihan kursus menjahit, bordir dan salon. Tetapi kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak menyentuh kepada Para Pemuda Kampung Permata, mengingat sebagian besar Para Pemuda Kampung Permata terkontaminasi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dengan demikian menurut hemat penulis, kegiatan-kegiatan tersebut belum berjalan maksimal karena belum menyentuh sasaran kepada Para Pemuda Kampung Permata. Dimana arah kebijakan dan strategi BNN melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan lingkungan bebas Narkoba.

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang melibatkan LSM seperti YCAB maupun yang dilaksanakan oleh BNN sendiri tidak mempertimbangkan hal-hal apa yang bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat khususnya Para Pemuda Kampung Permata untuk ikut terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, atau dengan kata lain kegiatan-kegiatan apa yang bisa menjadi daya tarik bagi Para Pemuda Kampung Permata untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut.

Selain hal tersebut di atas, kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat baik yang melibatkan LSM YCAB maupun yang dilaksanakan oleh BNN sendiri di Kampung Permata dilaksanakan

tidak secara berkelanjutan, dimana kegiatan yang dilaksanakan hanya pada tingkat dasar dan tidak sampai pada tingkat yang lebih tinggi, sehingga sulit dirasakan bagi masyarakat yang bersangkutan untuk dapat memanfaatkan pengetahuan yang didapat untuk dapat bersaing dengan dunia luar khususnya dalam mencari pekerjaan.

Berpedoman pada hal-hal tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa pengurangan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada daerah Kampung Permata belum dapat dirasakan hasilnya. Sehingga kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan belum berjalan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba.

Kondisi tersebut di atas, menurut hemat penulis menggambarkan sebuah pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal, karena kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang melibatkan LSM YCAB maupun yang dilaksanakan oleh BNN sendiri terhadap Kampung Permata baru sebatas diterimanya program-program BNN oleh masyarakat, tetapi kegiatan-kegiatan tersebut belum sampai menyentuh pada seluruh sasaran, yaitu Para Pemuda Kampung Permata untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, mengingat sebagian besar Para Pemuda Kampung Permata terkontaminasi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, melalui karya ilmiah ini penulis akan berupaya untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat, baik yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB maupun oleh BNN sendiri terhadap daerah yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada Kampung Permata. Sehingga penulis dapat



mengetahui sampai sejauh mana efektivitas LSM seperti YCAB dalam bermitra dengan BNN, maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh BNN sendiri terhadap Kampung Permata.

Terkait dengan masalah efektivitas, menurut Sumaryadi (2005: 105) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Amirullah dan Ribdyah Hanafi (2002) menjelaskan bahwa efektivitas adalah menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Menurut Ravianto (1989), pengertian efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Sedangkan Gibson dalam Tangkilisan (2005) mengatakan bahwa efektivitas organisasi dapat diukur melalui:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang matang
5. Penyusunan program yang tepat
6. Tersediannya sarana dan prasarana
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sedangkan pengertian kemitraan sebagaimana yang diungkapkan oleh sejumlah pakar menunjuk kepada suatu sistem kerjasama antara pemerintah dan non pemerintah dalam kedudukan

yang sejajar dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong-royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Notoatmodjo (2003) bahwa kemitraan adalah suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Adapun unsur-unsur kemitraan adalah:

1. Adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih.
2. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut.
3. Adanya keterbukaan atau *trust relationship* antara pihak-pihak tersebut.
4. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menjadi suatu pertanyaan yang menarik, apakah LSM YCAB dan BNN yang bekerja sama sebagai mitra dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, apakah sudah cukup efektif sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan sekaligus merupakan judul dari topik yang dibahas, yaitu tentang **“Efektivitas LSM YCAB Sebagai Mitra BNN Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Permata”**.

## 1.2 PERUMUSAN MASALAH

Melalui karya ilmiah ini penulis akan mencoba mengidentifikasi program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, baik yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB maupun yang telah dilaksanakan oleh BNN sendiri berdasarkan arah kebijakan dan strategi

Badan Narkotika Nasional (BNN). Adapun permasalahan yang dapat diangkat adalah:

1. Apakah program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, baik yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB maupun oleh BNN sendiri sudah berjalan baik sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN?
2. Bila belum, apakah yang menjadi kendala-kendala LSM YCAB dan BNN dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?
3. Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan LSM YCAB dan BNN dalam mengatasi kendala-kendala pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?

### 1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa, apakah program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, baik yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB maupun oleh BNN sendiri sudah berjalan baik sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa, apakah yang menjadi kendala-kendala LSM YCAB dan BNN dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa, upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan LSM YCAB dan BNN dalam mengatasi kendala-kendala pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata.

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang didapat melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

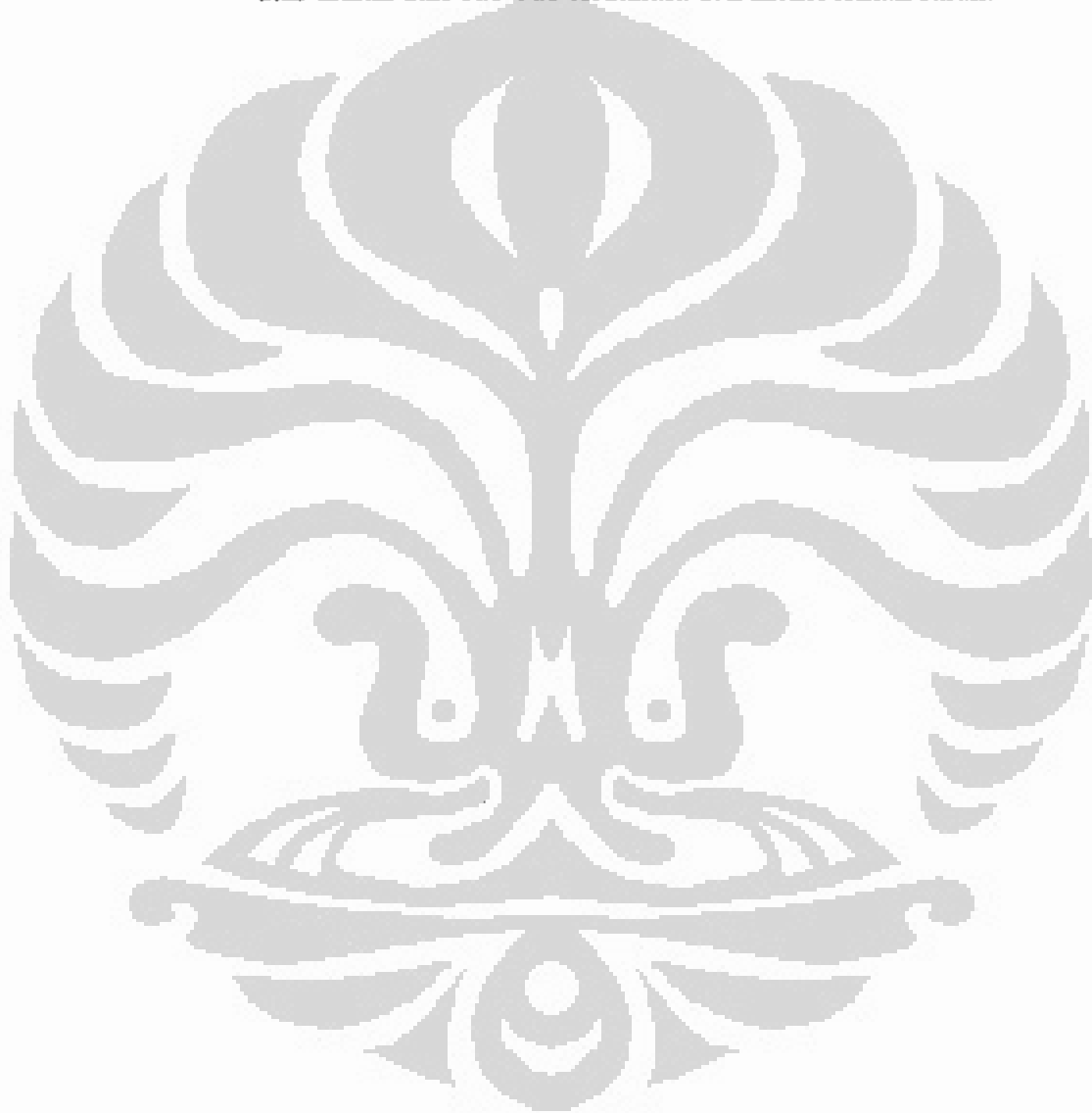
1. Sebagai bahan evaluasi terhadap program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, baik yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB maupun yang telah dilaksanakan oleh BNN sendiri, terkait dengan arah kebijakan dan strategi yang telah digariskan oleh BNN.
2. Sebagai masukan bagi BNN dan LSM YCAB dalam merumuskan kebijakan dan strategi yang efektif di bidang pemberdayaan masyarakat.

## 1.5 TATA URUT PENULISAN

Adapun tata urutan penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan tata urutan penulisan.
2. Bab 2 Tinjauan Pustaka dalam penelitian ini berupa teori-teori yang relevan dan agar dapat mendukung sumber data baik data primer maupun data sekunder yang nantinya dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Bab 3 Gambaran Umum dari obyek yang akan diteliti, diantaranya adalah sejarah, visi dan misi serta strategi organisasi.
4. Bab 4 Metode Penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti

5. Bab 5 Hasil Pembahasan, dalam bab ini akan membahas program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB dan BNN dan memaparkan seuruh hasil penelitian.
6. Bab 6 Penutup, dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan atas uraian dari bab-bab terdahulu dan memberikan saran.



## BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pemberdayaan Masyarakat

#### 2.1.1 Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan

Hubungan dan kerjasama antara LSM dengan BNN sesungguhnya untuk menciptakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Karena melalui kegiatan pemberdayaan tersebut para LSM diharapkan dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya untuk bersama-sama menanggulangi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Indonesia.

Menurut *Oxford English Dictionary* dalam Prijono (1996: 3) istilah pemberdayaan (*empowerment*) mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah *to give power or authority to* dan pengertian kedua adalah *to give ability to or enable*. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuasaan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak lain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Dari kedua pengertian tersebut maka konsep pemberdayaan tidak hanya menyangkut individu tetapi juga secara kolektif. Ini tidak lain adalah menempatkan konsep pemberdayaan atau *empowerment* sebagai bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Lebih lanjut Moeljarto (1996) mengatakan bahwa proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses

pemberdayaan yang menekankan kepada memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dalam hal ini Moeljarto (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan merupakan proses pematihan (*breakdown*) dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya "pengakuan" subyek akan "kemampuan" dan upaya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya aliran daya (*flow of power*) dari subyek ke obyek yang merupakan upaya atau cita-cita untuk mengintegrasikan masyarakat miskin ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (yang baru) sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subyek dengan subyek yang lain. Dengan kata lain proses pemberdayaan merubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek.

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mengubah keadaan seseorang atau kelompok agar yang bersangkutan menjadi lebih berdaya. Hulme dan Turner, dalam Pranarka & Moeljarto (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk

memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi, karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat ia tinggal.

Menurut Sumodiningrat (1997), upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya;
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya dalam memanfaatkan peluang;
3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah. Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah-langkah kongkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah yang tepat, upaya pemberdayaan akan mengalami banyak kendala.



Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri mencakup pengertian pengembangan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community based-development*). Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan istilah keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta inovatif, tentunya memiliki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan masyarakat adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat yang bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sedangkan memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Kartasasmita, 1996). Jadi pemberdayaan pada intinya adalah pembangunan manusia, dengan maksud agar manusia yang diberdayakan menjadi lebih berguna dalam lingkungannya.

Munculnya konsep pemberdayaan sebagai sebuah pendekatan dalam pembangunan yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan beberapa paradigma yang telah mendahuluinya. Bahkan bisa dikatakan pemberdayaan merupakan pendekatan alternatif dalam pelaksanaan pembangunan. Pemberdayaan sudah mulai menjadi wacana ilmiah dalam masa pembangunan sejak dekade 80-an hingga berlanjut dan terus berkembang sampai sekarang. Akan tetapi sebenarnya secara historis pemberdayaan telah mulai dilaksanakan pada awal gerakan modern di Eropa (Priyono, 1996).

Adi (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan untuk mengembangkan klien dari keadaan tidak atau kurang berdaya

menjadi mempunyai daya guna mencapai hidup yang lebih baik. Sedangkan Payne dalam Adi (2001) memberikan suatu pengertian yang lengkap mengenai pemberdayaan sebagai berikut: "Suatu proses yang ditujukan guna membantu klien memperoleh daya untuk mengambil keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial dalam melakukan tindakan".

Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Mahardika (2001) melihat pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya tawar rakyat dengan cara memberikan pendampingan guna meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, sehingga dapat memahami dengan seksama penderitaan yang dihadapi dan dapat mengaktualisasikan aspirasi mereka.

Menurut Cassidy & Jakes bahwa pemberdayaan merupakan bagian dari suatu program pengembangan masyarakat. Potensi masyarakat memiliki dampak langsung terhadap upaya pemberdayaan. Jika suatu masyarakat memiliki suatu pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sebagainya, maka masyarakat tersebut harus merasa lebih mampu untuk membuat perbedaan (Cassidy & Jakes, 2008).

Selain hal tersebut di atas, aset masyarakat atau sumber daya yang terdiri dari sarana prasarana, struktur sosial, masyarakat, budaya, dan kemampuan ekonomi, juga memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan. Adapun pemberdayaan yang terdiri dari faktor perasaan untuk mementingkan orang lain, adanya motivasi, persepsi masyarakat, dan dukungan, memiliki dampak langsung terhadap tingkat partisipasi, atau mobilisasi yang ditimbulkan. Jika seseorang merasa mampu, termotivasi untuk membuat perubahan,

serta memiliki dukungan yang memadai dari masyarakat, maka orang tersebut harus memiliki peranan yang lebih besar dalam berpartisipasi. Potensi masyarakat dan sumberdaya yang dimiliki memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi, dimana tingkat pengaruh tersebut dipengaruhi melalui proses pemberdayaan. Pada akhirnya tingkat partisipasi juga memiliki pengaruh langsung terhadap potensi yang dimiliki (seseorang yang berpartisipasi dalam program masyarakat akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan dan ketrampilan), dan hal tersebut memiliki efek pada peningkatan sumber daya yang difasilitasi oleh perubahan pada komunitas atau *community change* (partisipasi harus menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat, yang juga harus mengakibatkan perubahan pada infrastruktur masyarakat). Partisipasi juga memiliki dampak langsung terhadap pemberdayaan (seseorang yang berpartisipasi harus merasa lebih berkompeten, termotivasi, dan memiliki dukungan yang lebih besar dari masyarakat). Bagaimanapun, tingkat keberhasilan partisipasi seseorang sangat tergantung kepada perubahan yang terjadi dalam suatu komunitas karena partisipasinya tersebut.

Dari berbagai definisi dan teori mengenai pemberdayaan, penulis cenderung untuk menggunakan konsep yang diajukan oleh Cassidy & Jakes, karena pemberdayaan yang dimaksudkan dalam konsep ini memiliki keterkaitan dengan tingkat partisipasi atau mobilisasi masyarakat sebagai upaya untuk menghasilkan suatu perubahan pada masyarakat atau komunitas.

### **2.1.2 Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan**

Pada masa pemerintahan Orde Baru, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan pembangunan kurang begitu diperhatikan. Masyarakat sebagai pihak yang tidak

berdaya kurang diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensinya.

Peranan pemerintah amat menonjol dalam berbagai hal terutama dalam hal penguasaan sumber daya pembangunan, bersikap koptasi dan keputusan yang diambil bersifat *top down*. Pola pendekatan seperti ini menurut Soetrisno (1995) mengakibatkan hilangnya kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemandirian dan mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan, maka hal yang diperlukan adalah mengurangi peran pembuat kebijaksanaan, dalam hal ini pemerintah yang selama ini bersikap dominan, regulator dan koptatif menjadi fasilitator yang berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan menentukan arah kebijaksanaan pembangunan saja.

Dalam era pemberdayaan sekarang ini, peranan pemerintah perlu dikurangi seminimal mungkin, sementara itu partisipasi masyarakat perlu dikedepankan. Pentingnya mengedepankan partisipasi masyarakat, dikarenakan pembangunan yang dilaksanakan ibarat sebuah mesin dan partisipasi merupakan mesinnya pembangunan itu sendiri (Soetrisno, 1995).

Pendapat tersebut memberi indikasi bahwa kalau mesin partisipasi masyarakat mati maka aktivitas pembangunan dengan sendirinya terhenti atau macet. Oleh karena itu, mesin partisipasi yang menghidupkan nafas pembangunan perlu diberikan ruang yang memadai agar tumbuh dan berkembang mengisi aktivitas pembangunan.

Pengertian partisipasi menurut konsepsi aparat pemerintah pada dasarnya berbeda dengan konsepsi yang diajukan oleh para ilmuwan serta pihak praktisi dan pemerhati pembangunan. Partisipasi menurut aparat pemerintah diartikan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung suatu program yang direncanakan dari atas,

bukan dari rakyat sendiri (Soetrisno, 1995). Definisi seperti ini lebih bernuansa "mobilisasi" daripada "keterlibatan". Padahal makna partisipasi yang sebenarnya adalah terdapat adanya pengakuan yang sungguh terhadap kreativitas dan inisiatif rakyat. Masyarakat bukan dijadikan sebagai obyek yang mudah dimobilisasi, tetapi diakui dan ditempatkan sebagai pelaku utama pembangunan yang aktif terlibat dalam proses pembangunan secara utuh mulai sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan.

Pengertian partisipasi dikemukakan oleh beberapa ahli berikut ini. Mubyarto (1994) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Sedangkan Battaharyya memandang partisipasi sebagai pengambilan bagian dalam kegiatan bersama (Ndraha, 1990). Pengertian partisipasi menurut kedua ahli tersebut pada intinya menekankan bahwa keterlibatan seseorang, keluarga, kelompok ataupun komunitas dalam kegiatan pembangunan dilakukan atas dasar kesadaran dan kemauan sendiri serta dilakukan sesuai potensi atau kapasitas dan ketrampilan yang dimiliki. Partisipasi pada dasarnya merupakan peristiwa psikologis karena berkaitan dengan keterlibatan mental dan emosional.

Ife (1995) mengatakan bahwa orang-orang akan berpartisipasi apabila merasakan suatu isu atau aktivitas menjadi penting. Sedangkan Peter M. Blau dalam teorinya "*Exchange Theory*" atau "Teori Pertukaran" mengatakan bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan (Ndraha, 1990).

Dari berbagai pandangan di atas, dapat digambarkan bahwa seseorang dapat termotivasi untuk terlibat dalam berbagai aktivitas

pemberdayaan atau pembangunan di masyarakat, karena ada manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Tanpa ada keuntungan yang diperoleh orang-orang akan bersikap pasif dalam aktivitas pemberdayaan atau pembangunan. Chapin dalam Mubyarto (1994) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Partisipasi langsung dalam kegiatan bersama secara fisik atau tatap muka;
2. Partisipasi dalam bentuk dana;
3. Partisipasi dalam bentuk dukungan
4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan;
5. Partisipasi representatif dengan cara memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya.

Dapat terlihat bahwa bentuk dari partisipasi itu bermacam-macam. Jika ini dipadukan dan masyarakat saling melengkapi maka akan merupakan kekuatan yang saling bersinergis untuk menjamin keberhasilan proses pemberdayaan. Partisipasi juga dipandang sebagai alat sekaligus sebagai tujuan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Sebagai alat berarti melalui pemberdayaan masyarakat dapat mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah ditentukan bersama. Sedangkan sebagai tujuan, berarti melalui proses pemberdayaan masyarakat dapat memiliki ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk lebih dapat berpartisipasi secara positif.

## **2.2 Kemampuan Seorang Manajer**

### **2.2.1 Menguasai Teori tentang Teknik, Taktik dan Strategi di bidangnya (komunikasi)**

Komunikasi dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berhubungan sangat erat. Strategi pembangunan menentukan strategi

komunikasi, maka makna komunikasi pembangunan pun bergantung pada modal atau paradigma pembangunan yang dipilih oleh suatu negara (Sitompul, 2002: 1).

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan. Menurut Everett M. Rogers dalam Sitompul (2002; 1) menyatakan bahwa, secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa. Pada bagian lain Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar dari perubahan sosial.

Selanjutnya Sitompul menjelaskan bahwa perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan ke arah yang lebih baik atau lebih maju dari keadaan sebelumnya. Oleh karena itu peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan tersebut. Artinya kegiatan komunikasi harus mampu mengantisipasi gerak pembangunan. Dikatakan bahwa pembangunan adalah merupakan proses, yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Jika dilihat dari segi ilmu komunikasi yang juga mempelajari masalah proses, yaitu proses penyampaian pesan seseorang kepada orang lain untuk merubah sikap, pendapat dan perilakunya. Dengan demikian pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen, yakni komunikator pembangunan, bisa aparat pemerintah ataupun masyarakat, pesan pembangunan yang berisi ide-ide ataupun program-program pembangunan, dan komunikasi pembangunan, yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa atau kota yang menjadi sasaran pembangunan.

Dengan demikian pembangunan di Indonesia adalah rangka pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia harus bersifat pragmatik, yaitu suatu pola yang

membangkitkan inovasi bagi masa kini dan yang akan datang. Dalam hal ini tentunya fungsi komunikasi harus berada di garis depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia Indonesia sebagai pemeran utama pembangunan, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan.

Selanjutnya Sitompul menyatakan bahwa berdasarkan pengamatan terhadap perkembangan konsep komunikasi pembangunan, maka dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta "teknik" penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa kedua pengertian tersebut, merupakan acuan dari konsep komunikasi pembangunan pada umumnya. Sedangkan konsep pembangunan khas Indonesia dapat didefinisikan sebagai berikut: "Komunikasi Pembangunan adalah proses penyebaran pesan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat" (Effendy, 2005: 92)

Menurut Nasution (2004: 163-164) bahwa agar komunikasi pembangunan lebih berhasil mencapai sasarannya, serta dapat menghindarkan kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan. Kesenjangan efek ditimbulkan oleh kekeliruan cara-cara



komunikasi, hal ini bisa diperkecil bila memakai strategi komunikasi pembangunan yang dirumuskan sedemikian rupa, yang mencakup prinsip-prinsip berikut:

1. Penggunaan pesan yang dirancang secara khusus (*tailored message*) untuk khalayak yang spesifik.
2. Pendekatan "*ceiling effect*" yaitu dengan mengkomunikasikan pesan-pesan yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan redundansi (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai.
3. Penggunaan pendekatan "*narrow casting*" atau melokalisasi penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak.
4. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukkan rakyat yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat.
5. pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*), dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan-pesan pembangunan.
6. Mengaktifkan keikutsertaan agen-agen perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri.
7. Diciptakan dan dibina cara-cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak (sebagai pelaku-pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan) dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya.

Selanjutnya Rogers dalam Sitompul (2002: 2) mengatakan bahwa komunikasi tetap dianggap sebagai perpanjangan tangan para perencana pemerintah, dan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan dukungan masyarakat dan partisipasi mereka dalam

pelaksanaan rencana-rencana pembangunan. Dari pendapat Rogers ini jelas bahwa setiap pembangunan dalam suatu bangsa memegang peranan penting. Dan karenanya pemerintah dalam melancarkan komunikasinya perlu memperhatikan strategi apa yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan sehingga efek yang diharapkan itu sesuai dengan harapan.

Para ahli komunikasi terutama di negara-negara berkembang mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap strategi komunikasi dalam hubungannya dengan penggiatan pembangunan nasional di negara-negara masing-masing. Fokus perhatian ahli komunikasi ini memang penting karena efektivitas komunikasi bergantung pada strategi komunikasi yang digunakan.

Menurut Effendy dalam Sitompul (2002: 2) mengatakan strategi baik secara makro (*planned multimedia strategy*) mempunyai fungsi ganda yaitu:

1. Menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan instruktif secara sistematis kepada sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal.
2. Menjembatani "cultural gap" akibat kemudahan diperolehnya dan kemudahan dioperasionalkannya media massa yang begitu ampuh, yang jika dibiarkan akan merusak nilai-nilai budaya.

Menurut Sitompul (2002: 2) strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah saja, melainkan harus menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya. Dengan demikian strategi komunikasi merupakan paduan dari perencanaan komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus

dapat menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktis harus dilakukan, dalam arti bahwa pendekatan (*approach*) bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi.

Sitompul menjelaskan bahwa dalam strategi komunikasi peranan komunikator sangatlah penting. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Para ahli komunikasi cenderung sependapat bahwa dalam melancarkan komunikasi lebih baik mempergunakan pendekatan yang disebut *A-A Procedure* atau *from Attention to Action Procedure*. *A-A Procedure* adalah penyederhanaan dari suatu proses yang disingkat AIDDA (*Attention, Interest, Desire, Decision, Action*). Jadi proses perubahan sebagai efek komunikasi melalui tahapan yang dimulai dengan membangkitkan perhatian. Apabila perhatian komunikan telah terbangkitkan, hendaknya disusul dengan upaya menumbuhkan minat, yang merupakan derajat yang lebih tinggi dari perhatian. Minat adalah kelanjutan dari perhatian yang merupakan titik tolak bagi timbulnya hasrat untuk melakukan suatu kegiatan yang diharapkan komunikator. Hanya ada hasrat saja pada diri komunikan, bagi komunikator belum berarti apa-apa sebab harus dilanjutkan dengan datangnya keputusan, yakni keputusan untuk melakukan tindakan.

Selain melalui pendekatan di atas, maka seseorang komunikator harus mempunyai kemampuan untuk melakukan perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku apabila dirinya terdapat faktor-faktor kredibilitas dan *attractiveness*. Rogers dalam Sitompul (2002: 3) mengatakan kredibilitas adalah tingkat dimana komunikator dipersepsi sebagai suatu kepercayaan dan kemampuan oleh penerima. Hovland dalam Krech (1982) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator yang tingkat kredibilitasnya tinggi akan lebih banyak memberi pengaruh kepada perubahan sikap dalam penerimaan pesan daripada jika

disampaikan oleh komunikator yang tingkat kredibilitasnya rendah. Rakhmat dalam Sitompul (2002: 3) mengatakan dalam berkomunikasi yang berpengaruh terhadap komunikan bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga keadaan komunikator secara keseluruhan. Jadi ketika suatu pesan disampaikan, komunikan tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan tetapi ia juga memperhatikan siapa yang mengatakan.

Selain strategi komunikasi pembangunan di atas, menurut Mahmud (2007) efektivitas penyuluhan komunikasi melekat dengan teknik komunikasi yang dipergunakan. Jika forum komunikasi merupakan saluran bagi penyebaran pesan pembangunan, maka teknik komunikasi adalah cara bagaimana supaya penyebaran pesan pembangunan dapat menimbulkan efek yang diharapkan, sebab fungsi teknik komunikasi yang utama adalah:

1. Membangun pengertian atau pemahaman yang sama tentang suatu pesan/informasi. Sesuai dengan asal katanya komunikasi (*communication*) dari kata latin *communis* yang berarti sama, atau *communico* yang berarti membuat sama (Mulyana, 2005: 41).
2. Mengarahkan komunikan pada tujuan komunikasi (*distination*), yaitu terjadinya perubahan pendapat, sikap atau perilaku ditunjukkan melalui umpan balik (*feedback*) dari komunikan (Charnley, 1965: 335).

Selanjutnya Mahmud menjelaskan bahwa beberapa teknik komunikasi yang sesuai dengan kondisi pedesaan dan sangat menentukan efektivitas penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah di antaranya sebagai berikut:

1. Model Komunikasi Dua Tahap, yaitu agen perubahan merupakan pelaku komunikasi dengan peran-peran tertentu.

Peran agen perubahan menunjukkan adanya aspek dinamis dari kedudukan seorang agen perubahan (Lavel, 1996: 81). Peran utama agen perubahan adalah katalisator yang menggerakkan masyarakat untuk melakukan perubahan, pemberi pemecahan persoalan, pembantu proses perubahan atau membantu proses pemecahan masalah dan penyebaran inovasi serta penghubung (*linker*) dengan sumber-sumber yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Havelock, 1973: 7). Keberadaan agen perubahan (*change agents*) dalam kegiatan komunikasi pembangunan sekaligus merupakan komunikator lokal bagi lingkungannya. Model komunikasi dua tahap (*two step flow communications*) menempatkan agen perubahan sebagai pemuka pendapat (*opinion leaders*) dalam proses berkomunikasi. Menurut Sutanto (1977) pada masyarakat tradisional (pedesaan) dependensi terhadap pemuka pendapat khususnya dalam menginterpretasikan isi pesan komunikasi sangat tinggi. Pemuka pendapat adalah pemimpin informal yang tidak selalu memiliki otoritas formal namun sangat berperan dalam membimbing tingkah laku dan mempengaruhi keputusan masyarakat (Muhammad, 2005: 12). Atas dasar kedua pendapat tersebut, maka keberadaan pemuka pendapat sangat diperlukan dalam mempengaruhi sikap, pendapat dan perilaku (partisipasi) masyarakat.

2. Model Komunikasi Persuasif, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk mempengaruhi pilihan komunikan, demikian menurut Brembeck dan William S. Howell (1976: 19). Komunikasi persuasif dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi dan mengendalikan perilaku orang lain melalui pendekatan psikologis (Rakhmat, 1995: 6). Komunikasi persuasif adalah suatu teknik mempengaruhi manusia dengan memanfaatkan data dan fakta psikologis maupun sosiologis dari komunikan yang hendak dipengaruhi (Susanto, 1977). Menurut Kertapati

(1980) teknik komunikasi persuasif dapat dilakukan dengan cara *acceptance device*, yaitu penyampaian pesan dengan kata-kata atau simbol-simbol komunikasi yang memberikan asosiasi yang menyenangkan. Cara ini dapat dipergunakan untuk memperoleh penerimaan (*acceptance*), kepercayaan (*confidence*), dukungan (*support*) dan partisipasi masyarakat. Cara selanjutnya adalah *rejection device*, yaitu penyampaian pesan dengan kata-kata atau simbol-simbol komunikasi yang membangkitkan rasa khawatir atau takut (*fear arousing*). Dan yang berikut dengan cara *testimonial device*, yaitu pesan atau ajakan dilakukan dengan cara mensitir, kata-kata, pendapat orang-orang terkenal, atau dalil-dalil penguat. Serta *bandwagon device*, yaitu persuasi dengan cara menyediakan supporter atau tukang tepuk.

3. Model Komunikasi Dua Arah, yaitu unsur utama terjadinya adalah adanya tanggapan/balikan (*feedback*) dari komunikan terhadap pesan/informasi yang diberikan oleh komunikator, sehingga antara komunikator dan komunikan berada dalam situasi komunikasi yang saling berinteraksi dan sejajar (Sailer dalam Muhammad, 2005). Komunikasi dua arah dapat dilakukan dengan cara menjaring aspirasi atau masukan publik dengan mengadakan konsultasi publik, yaitu suatu metode untuk pertukaran informasi, gagasan dan kepedulian tentang suatu isu antara pemerintah dan masyarakat (Sumarto, 2004). Melalui proses ini masyarakat memperoleh kesempatan untuk mempengaruhi perumusan kebijakan. Dengan konsultasi publik diharapkan terbangun dukungan dari masyarakat terhadap program yang diusulkan. Dalam proses konsultasi akan terjadi proses saling mendengar antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dan pelaksana pembangunan memiliki kesempatan untuk mendengar dan melihat kenyataan di masyarakat setempat.

4. Model Komunikasi Deliberatif, yaitu sebagai proses pengambilan keputusan yang didahului dengan diskusi (musyawarah) tentang alasan dukungan/penentangan terhadap suatu pandangan (Sumartono 2004: 14). Prasarana pedesaan adalah barang publik yang dalam penyediaannya membutuhkan adanya keputusan publik. Oleh karena keputusan publik sangat terkait dengan proses berdemokrasi, maka pengembangan komunikasi pembangunan dalam penyediaan prasarana pedesaan hendaknya juga memperhatikan bagaimana tipologi berdemokrasi yang ada di desa. Menurut Diamond (1999) bahwa demokrasi perwakilan hanya cocok sampai tingkat kabupaten, karena dari segi wilayah dan penduduk, maka gagasan demokrasi menggunakan metode musyawarah tidak mungkin diterapkan. Di desa karena ukurannya yang masih terjangkau, akan lebih baik mempraktikkan demokrasi partikular yang berbasis pada komunitarian. Dengan demikian teknik komunikasi deliberatif menjadi salah satu teknik komunikasi pembangunan yang sangat penting dalam proses penyediaan prasarana di wilayah pedesaan.

Sehubungan dengan hal-hal yang disampaikan di atas, yaitu mengenai strategi dan teknik dalam berkomunikasi, hal yang perlu diperhatikan juga adalah mengenai cara penyampaian berkomunikasi atau taktik komunikasi kepada komunikan. Taktik merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik tertentu yang sifatnya individual (Sudrajat, 2008). Selanjutnya Sudrajat memberikan contoh: misalkan, terdapat dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah, tetapi mungkin akan sangat berbeda dalam taktik yang digunakannya. Dalam penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki sense of humor yang tinggi, sementara yang satunya lagi

kurang memiliki sense of humor, tetapi lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Dalam gaya komunikasi akan tampak keunikan atau kekhasan dari masing-masing komunikator, sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari komunikator yang bersangkutan.

Apabila antara pendekatan, strategi, teknik dan taktik komunikasi sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh maka terbentuklah apa yang disebut dengan model komunikasi. Jadi model komunikasi pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh komunikator. Dengan kata lain, model komunikasi merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu strategi teknik dan taktik komunikasi.

Dengan demikian menurut hemat penulis, sehubungan dengan kemampuan seorang manajer dalam memimpin sebuah organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya, maka dalam berkomunikasi dengan komunikan atau bawahan yang dipimpinnya, manajer tersebut harus mampu mengolah strategi, teknik dan taktik dalam menyampaikan maksud dan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya. Strategi, teknik dan taktik yang dimaksud bukan bersifat otoriter, sehingga tercipta adanya atensi yang mendorong untuk memberikan tanggapan ataupun masukan dari komunikan atau bawahan yang pada akhirnya tercipta sebuah keputusan bersama untuk direalisasikan.

### **2.2.2. Memahami Kemampuan Communication and Relation**

Koncaid & Schramn (2010) menyatakan komunikasi sebagai sebuah proses, artinya komunikasi merupakan proses berbagi/menggunakan sebuah informasi secara bersama dan



pertalian antara peserta dalam proses informasi tersebut dinamakan komunikasi. Selanjutnya dijelaskan mengenai ciri-ciri adanya proses komunikasi, yaitu harus ada 2 pihak atau lebih, dan ada proses berbagi informasi, sehingga harus selektif dalam memilih alat komunikasi dan memilih pola yang sesuai untuk menggambarkan pikiran. Lebih jauh ia menyatakan bahwa langkah-langkah dalam sebuah proses komunikasi adalah menciptakan informasi, menyampaikan informasi tersebut, memperdalam perhatian, menafsirkannya, memahaminya lalu melaksanakan, serta timbulnya pengertian bersama.

Rogers & Shoemaker (2010) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses pesan yang disampaikan dari sumber kepada penerima. Sedangkan Hovland, Janis & Kelley (2010) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses melalui mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya (khalayak).

Menurut Barnlund (2010) menyatakan bahwa komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan-kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Sedangkan Ruesch (2010) mendefinisikan komunikasi sebagai suatu proses yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lainnya dalam kehidupan. Selanjutnya K. Lewin (2010) menyatakan bahwa komunikasi adalah pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain.

Dari berbagai definisi dan teori mengenai komunikasi, penulis cenderung untuk menggunakan konsep yang diajukan oleh Koncaid dan Schramn, karena komunikasi yang dimaksudkan dalam konsep ini memiliki keterkaitan dengan kemampuan seorang manajer dalam

berkomunikasi atau menyampaikan pesan kepada komunikan atau bawahan.

Menurut Setiawan (2009) Perkembangan relasi dipengaruhi oleh komunikasi, dan pada gilirannya secara serentak perkembangan relasi mempengaruhi sifat komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam relasi. Adapun peranan relasi adalah sebagai berikut:

1. Membentuk dan memelihara perasaan '*Mutual Interest*' dengan orang lain saling mementingkan, bisa bersama-sama dengan orang lain atau diterima orang lain. Jika kebutuhan ini terpenuhi, orang akan merasa berguna, jika tidak terpenuhi, orang akan merasa kesepian.
2. Kemampuan untuk mewujudkan dan memelihara tingkat kepuasan kontrol serta kekuatan di dalam relasi dengan orang lain. Jika kebutuhan ini terpenuhi, orang dipandang mampu membuat keputusan atau mempengaruhi orang lain, serta masa depannya sendiri.
3. Memberi dan menerima cinta atau kasih sayang dan atau mengalami relasi dengan perasaan dekat atau erat.

Menurut Sarah Trenholm dalam setiawan (2009) mengemukakan beberapa pengertian tentang relasi, diantaranya adalah:

1. Relasi setara dengan tindakan yang saling tergantung antara 2 orang. Relasi adalah semua hal tentang apa yang dipikirkan oleh 2 orang manakala melakukan hal bersama-sama.
2. Relasi sebagai suatu konstruksi kognitif di dalam pikiran kita manakala kita memikirkan satu sama lain. Relasi adalah cara kita memikirkan perilaku kita.
3. Relasi bukan sebagai pandangan induvidu, melainkan pemahaman bersama. Manakala 2 orang melakukan hubungan

antar pribadi mereka menciptakan kultur kecil-kecilan, mengembangkan persepsi bersama dan peran masing-masing.

4. Relasi sebagai sekumpulan kekuatan yang saling berlawanan. Relasi adalah suatu dialog antara 2 orang yang saling mempunyai perbedaan pandangan, masing-masing pernyataan sebagai ungkapan hati, tetapi kenyataannya saling berbeda.

### **2.2.3 Peka pada Lingkungannya baik Eksternal dan Internal**

Sejauh mana perhatian manajer terhadap lingkungan ditentukan oleh kompleksitas lingkungan yaitu jumlah faktor-faktor eksternal di dalam lingkungan yang mempengaruhi organisasi. Lingkungan eksternal organisasi dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Lingkungan makro merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap kegiatan organisasi, meliputi: kondisi ekonomi, kondisi sosial budaya, kondisi politik dan hukum, kondisi teknologi, kondisi lingkungan alam dan kondisi dimensi internasional. Sedangkan lingkungan mikro merupakan lingkungan yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kegiatan organisasi, meliputi: pelanggan, pemasok, pesaing, pembuat peraturan/pemerintah, serikat pekerja dan lembaga keuangan.

Menurut Tafiprios lingkungan umum atau makro terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi Ekonomi, faktor-faktor ekonomi seperti inflasi, deflasi, kebijakan-kebijakan moneter, devaluasi, suku bunga, kebijakan fiskal, harga yang berlaku, deregulasi, keseimbangan neraca pembayaran dapat mempengaruhi biaya-biaya yang ditimbulkan dalam kegiatan ekonomi, sehingga manajer perlu memahami faktor-faktor tersebut.

2. Kondisi Sosial Budaya, faktor-faktor sosial budaya seperti sikap, pandangan, nilai-nilai yang dianut dan kepercayaan yang terbentuk oleh variabel pendidikan, demografis, tradisi, agama, etnis/suku, geografis, yang dapat mempengaruhi sikap masyarakat yang akan menentukan kegiatan-kegiatan organisasi.
3. Kondisi Politik dan Hukum, faktor-faktor politik dan hukum seperti kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, peraturan dan perundang-undangan serta kegiatan pemerintah sebagai konsumen, penyedia dan pesaing dapat mempengaruhi bagaimana organisasi harus melakukan aktifitas-aktifitasnya.
4. Kondisi Teknologi, tingkat kemajuan teknologi yang ditandai inovasi teknologi di bidang produk, produksi dan operasi sangat mempengaruhi tingkat persaingan dalam bisnis sehingga manajer harus memahami perkembangan teknologi dan inovasi.
5. Kondisi Lingkungan Alam, menghargai kondisi lingkungan alam serta perlindungan dan pemanfaatan alam secara bijaksana kini semakin menjadi perhatian dan tuntutan masyarakat dunia. Pemikiran *sustainable development* menjadi perhatian banyak kegiatan bisnis masa sekarang, yang menuntut manajer memahami peraturan dan tekanan masyarakat peduli lingkungan dan pecegahan yang harus dilakukan dengan pedoman 3R (Reduce the number of parts, Reuse the number of parts, Recycle the number of parts).
6. Kondisi Dimensi Internasional, faktor-faktor internasional seperti politik dunia, ketergantungan ekonomi, pengaruh nilai-nilai dan sikap hidup serta transfer teknologi, menuntut manajer untuk mampu menganalisa dampaknya terhadap kegiatan organisasi dan tanggap menghadapinya.

Sedangkan lingkungan khusus atau mikro terdiri atas faktor-faktor sebagai berikut:

1. Pelanggan, faktor sikap dan perilaku pelanggan dipengaruhi oleh persepsi dan preferensi mereka. Manajer perlu memahami kondisi pasar yang sangat dipengaruhi harapan dan keinginan serta kebutuhan konsumen untuk bisa merebut pasar sasaran.
2. Pemasok, kebutuhan sumber-sumber daya organisasi untuk memenuhi kebutuhan bahan mentah, bahan pembantu, pelayanan, energi dan peralatan bergantung pada penyedia atau pemasok dan kesediaan sumber-sumber. Manajer perlu memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan pemasok dan kesediaan sumber-sumber untuk menjaga kebutuhan sumber daya organisasi.
3. Pesaing, pemahaman arena persaingan, sifat persaingan serta kekuatan dan kelemahan pesaing memungkinkan perusahaan untuk dapat mempergunakan kemampuannya bersaing secara efektif dan efisien.
4. Pembuat Peraturan, peranan pemerintah sebagai pembuat peraturan mempengaruhi tindakan-tindakan yang dapat diambil organisasi, seperti peraturan pendirian usaha dan hal-hal yang berkaitan dalam kegiatan usaha yang harus dipatuhi, prosedur perizinan dan pembatasan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan pembangunan kegiatan ekonomi secara keseluruhan.
5. Serikat Pekerja, perkembangan serikat pekerja yang berkaitan dengan adanya tuntutan-tuntutan karyawan terhadap perusahaan sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dapat diambil manajer dalam organisasi.
6. Lembaga Keuangan, kebutuhan perusahaan terhadap tambahan modal dari lembaga-lembaga keuangan untuk memperluas usaha semakin besar. Manajer perlu memahami pentingnya

menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan untuk memperluas usaha semakin besar. Manajer perlu memahami pentingnya menjalin hubungan baik dengan lembaga-lembaga keuangan dengan mengerti tentang prosedur perbankan, mampu membuat transaksi berharga, membuat pembukuan yang akurat serta memiliki jaminan yang diperlukan.

Selain hal-hal tersebut di atas, Pengaruh Lingkungan Internal Organisasi perlu dipahami juga oleh seorang manajer. Adapun pengertian pengaruh lingkungan internal menurut Tafiprios adalah kejadian dan kecenderungan dalam suatu organisasi yang mempengaruhi manajemen, karyawan, dan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, keyakinan, dan sikap yang berlaku diantara anggota organisasi. Tafiprios menyatakan bahwa budaya organisasi seringkali diciptakan oleh pendiri perusahaan, kemudian dipertahankan dengan cara memberitahukan riwayat organisasi dan merayakan kepahlawanan organisasi.

Penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berkaitan dengan keberhasilan organisasi. Budaya organisasi yang berhasil didasarkan pada kemampuan untuk menyesuaikan diri, keterlibatan, misi yang jelas dan kemantapan atau konsistensi. Keberhasilan budaya organisasi membantu perusahaan mencapai pertumbuhan penjualan, pengembalian modal, keuntungan, mutu dan kepuasan karyawan yang lebih tinggi.

Kemampuan menyesuaikan diri adalah kemampuan untuk mengenali dan menanggapi perubahan lingkungan organisasi. Nilai-nilai organisasi yang lama dan dirasa perlu untuk diganti menuntut kemampuan karyawan dan manajemen untuk bisa menyesuaikan diri terhadap perusahaan tersebut. Pada budaya yang mendorong keterlibatan karyawan lebih tinggi dalam pengambilan keputusan,

akan menyebabkan karyawan memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab lebih besar.

Visi perusahaan merupakan maksud atau alasan mengapa perusahaan didirikan. Dalam budaya organisasi memiliki visi yang jelas dan tujuan serta arah strategis organisasi yang terlihat jelas bagi setiap karyawan organisasi akan mengarahkan manajer dan karyawan untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan melalui diskusi, keputusan dan perilaku karyawan yang searah dengan visi dan tujuan serta arah strategis organisasi yang jelas.

Budaya organisasi yang konsisten merupakan budaya organisasi yang kuat yang akan mendorong setiap karyawan untuk mampu dan terdorong terlibat mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam organisasi, sehingga mereka berkeinginan untuk selalu belajar mengatasi masalah.

## **2.3 Teori tentang Kepemimpinan**

### **2.3.1 Teori Kepemimpinan Sifat**

Menurut Junaidi (2010) analisis ilmiah tentang kepemimpinan berangkat dari pemusatan perhatian pemimpin itu sendiri. Teori sifat berkembang berkembang pertama kali di Yunani Kuno dan Romawi yang beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan yang kemudian teori ini dikenal dengan "the greatma theory".

Dalam perkembangannya, teori ini mendapat pengaruh dari aliran perilaku pemikir psikologi yang berpandangan bahwa sifat-sifat seluruhnya dilahirkan, akan tetapi juga dapat dicapai melalui pendidikan dan pengalaman. Sifat-sifat itu antara lain, sifat fisik, mental dan kepribadian.

### 2.3.2 Teori Kepemimpinan Perilaku dan Situasi

Menurut Junaidi (2010) berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan kearah dua hal: pertama yang disebut Konsiderasi yaitu kecenderungan pemimpin yang menggambarkan hubungan akrab dengan bawahan. Contoh gejala yang ada dalam hal ini seperti: membela bawahan, memberi masukan kepada bawahan dan bersedia berkonsultasi dengan bawahan. Kedua disebut Struktur Inisiasi yaitu kecenderungan seorang pemimpin yang memberikan batasan kepada bawahan. Contoh yang dapat dilihat, bawahan mendapat instruksi dalam pelaksanaan tugas, kapan, bagaimana pekerjaan dilakukan, dan hasil apa yang akan dicapai.

Jadi berdasarkan teori ini menurut Junaidi, seorang pemimpin yang baik adalah bagaimana seorang pemimpin yang memiliki perhatian yang tinggi kepada bawahan dan terhadap hasil yang tinggi juga. Kemudian juga timbul teori kepemimpinan situasi, dimana seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan.

### 2.3.3 Teori Humanistik

Menurut Junaidi (2010) teori ini lebih menekankan pada prinsip kemanusiaan. Teori Humanistik biasanya dicirikan dengan adanya suasana saling menghargai dan adanya kebebasan. Teori humanistik dengan para pelopor Argyris, Blake dan Mouton, Rensis Likert dan Douglas Mc Gregor. Teori ini secara umum berpendapat, secara alamiah manusia merupakan "motivated organism". Organisasi memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Fungsi dari kepemimpinan adalah memodifikasi organisasi agar individu bebas



untuk merealisasikan potensi motivasinya didalam memenuhi kebutuhannya dan pada waktu yang sama sejalan dengan arah tujuan kelompok. Apabila dicermati, di dalam Teori Humanistik, terdapat tiga variabel pokok, yaitu:

1. Kepemimpinan yang sesuai dan memperhatikan hati nurani anggota dengan segenap harapan, kebutuhan dan kemampuannya.
2. Organisasi yang disusun dengan baik agar tetap relevan dengan kepentingan anggota disamping kepentingan organisasi secara keseluruhan.
3. Interaksi yang akrab dan harmonis antara pimpinan dengan anggota untuk menggalang persatuan dan kesatuan serta hidup damai bersama-sama.

Blanchard, Zigarmi dan Drea menyatakan, kepemimpinan bukanlah sesuatu yang anda lakukan terhadap orang lain, melainkan sesuatu yang anda lakukan bersama dengan orang lain (Blanchard & Zigarmi, 2001).

## **2.4 Teori tentang Komunikasi**

### **2.4.1 Teori Behaviorisme**

Tokoh aliran ini adalah John B. Watson (1878-1958) yang di Amerika dikenal sebagai bapak Behaviorisme. Teorinya memumpunkan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia di sekelilingnya (Kurniati, 2010). Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas (respons) ditimbulkan oleh adanya rangsangan (stimulus). Jika rangsangan telah diamati dan diketahui maka gerak balaspun dapat diprediksikan.

Behaviorisme lahir sebagai reaksi terhadap introspeksionisme dan juga psikoanalisis. Behaviorisme ingin menganalisis hanya perilaku yang nampak saja, yang dapat diukur, dilukiskan dan diramalkan. Belakangan, teori kaum behavioris lebih dikenal dengan nama teori belajar, karena menurut mereka seluruh perilaku manusia kecuali *instink* adalah hasil belajar. Belajar artinya perubahan perilaku organisme sebagai pengaruh lingkungan. Behaviorisme tidak mau mempersoalkan apakah manusia baik atau jelek, rasional atau emosional. Behaviorisme hanya ingin mengetahui bagaimana perilakunya dikendalikan oleh faktor-faktor lingkungan.

#### 2.4.2 Teori Humanisme

Teori ini muncul diilhami oleh perkembangan dalam psikologi yaitu Psikologi Humanisme. Teori Humanisme dalam pengajaran bahasa pernah diimplementasikan dalam sebuah kurikulum pengajaran bahasa dengan istilah *Humanistic curriculum* yang diterapkan di Amerika Utara di akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Kurikulum ini menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggungjawab bersama antar seluruh siswa didik.

*Humanistic curriculum* menekankan pada pola pikir, perasaan dan tingkah laku siswa dengan menghubungkan materi yang diajarkan pada kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup siswa. Teori ini menganggap bahwa setiap siswa sebagai objek pembelajaran memiliki alasan yang berbeda dalam mempelajari bahasa. Tujuan utama dari teori ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa agar bisa berkembang di tengah masyarakat.

### **2.4.3 Teori Uses and Gratifications (Kegunaan dan Kepuasan)**

Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herbert Blumer dan Elihu Katz (1974). Teori ini mengatakan bahwa pengguna media memainkan peran aktif untuk memilih dan menggunakan media tersebut. Dengan kata lain, pengguna media adalah pihak yang aktif dalam proses komunikasi (Kurniati, 2010). Pengguna media berusaha mencari sumber media yang paling baik di dalam usaha memenuhi kebutuhannya. Artinya pengguna media mempunyai pilihan alternatif untuk memuaskan kebutuhannya.

Menurut Karl dalam Bugin (2007) elemen dasar yang mendasari pendekatan teori ini adalah kebutuhan dasar tertentu dalam interaksinya dengan berbagai kombinasi antara intra dan ekstra individu, dan juga dengan struktur masyarakat termasuk struktur media menghasilkan berbagai percampuran persoalan individu, dan persepsi mengenai solusi bagi persoalan tersebut yang menghasilkan berbagai motif untuk mencari pemenuhan atau penyelesaian persoalan yang menghasilkan perbedaan pola konsumsi media dan perbedaan pola perilaku lainnya, yang menyebabkan perbedaan pola konsumsi yang dapat mempengaruhi kombinasi karakteristik intra dan ekstra individu, sekaligus akan mempengaruhi pula struktur media dan berbagai struktur politik, kultural dan ekonomi dalam masyarakat.

## **2.5 Teori tentang Manajemen**

### **2.5.1 Teori Manajemen Klasik**

Frederick W. Taylor (1856-1915) dikenal sebagai bapak manajemen ilmiah. Dengan menggunakan studi waktu dan gerak ia mencari cara yang terbaik bagi pekerja pabrik baja Amerika untuk melakukan kerja yang kasar, seperti menyekop batu bara. Dengan

mempelajari besar kecilnya ukuran sekop untuk material yang berbeda besarnya, ia dapat meningkatkan produktivitas pekerja dari 16 menjadi 59 ton perhari. Taylor percaya bahwa dengan memaksimalkan produktivitas akan memaksimalkan keuntungan perusahaan dan pendapatan bagi karyawan. Manajemen dengan cepat berubah menjadi manajemen ilmiah. Namun, persatuan buruh menentangnya karena hal ini dianggap tidak berperikemanusiaan ("Tutoring and APA," n.d.).

Perhatian Taylor ditujukan pada tingkat pekerja dalam organisasi. Ia menganjurkan penggunaan standar penampilan, yaitu pencapaian tingkat produktivitas pekerja yang diharapkan. Walaupun bukan dalam wilayah kerja Taylor, gagasan standarnya ini dapat diterapkan juga dalam manajemen. Jika pekerja dan manajer memenuhi standarnya, maka perusahaan akan dapat mencapai tujuannya.

Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai oleh perusahaan atau unit organisasi. Standart adalah ukuran penampilan yang, jika dipenuhi akan menghasilkan tujuan yang dicanangkan. Sebagai contoh, tujuan penyejuk ruangan (AC) adalah untuk kenyamanan manusia. Sedangkan standar adalah setting pengatur udara yang membuat ketetapan suhu yang dapat diterima ("Tutoring and APA," n.d.).

Tujuan perusahaan dan unitnya cenderung berupa statemen yang luas dan umum. Standar dapat diterapkan dalam perusahaan, unit organisasinya, dan bahkan pada tiap karyawannya. Standar harus dinyatakan dalam kalimat yang jelas dan dapat diukur, sehingga tingkat pencapaiannya dapat diukur ("Tutoring and APA," n.d.).

Tiap manajer adalah mekanisme kontrol dari sistemnya. Manajer menjaga penampilan sistem pada target yang berkenaan

dengan tujuan, dengan membandingkan penampilan terhadap standar.

Teori manajemen yang lain dari Taylor, yaitu prinsip pengecualian. Gagasan ini, yaitu bahwa seseorang hanya akan memberi perhatian pada kekecualian dari standar, dikenal sebagai Manajemen dengan Pengecualian ... ("Tutoring and APA," n.d.). Manajer hanya akan terlibat terhadap masalah penampilan pengecualian (sangat baik atau sangat buruk). Manajemen dengan pengecualian ini menghemat waktu tugas manajer dengan mengarahkannya untuk memberi perhatian pada masalah yang ada dari pada hanya mengurus hal yang telah berjalan dengan baik.

Pencetus teori klasik yang kedua adalah orang Perancis Henri Fayol (1841-1925), yang pertama kali mengembangkan teori mengenai manajemen administratif ("Tutoring and APA," n.d.). Fayol mengetahui adanya perbedaan antara aktivis operasi dan manajerial, dan ia ingin mencari cara meningkatkan manajemen. Inilah yang membedakan Fayol dengan Taylor, yang mengkonsentrasikan pada masalah operasi.

Fayol terkenal dengan definisi fungsi manajemennya, yaitu aktivitas yang dilakukan manajer. Menurut Fayol, semua manajer menjalankan tugas perencanaan, pengorganisasian, pengaturan staf, pengarahan, dan pengontrolan. Bila disebutkan dalam susunan yang logis, tugas pertama adalah perencanaan apa yang harus dilakukan. Kemudian susunan organisasi yang tepat harus ditetapkan untuk pengimplementasian rencana. Manajer kemudian harus melakukan pengaturan staf untuk terjadinya aktivitas yang direncanakan dengan memperoleh sumber yang penting. Sementara istilah staf ini ditujukan untuk sumber manusia, maka sumber yang lain harus disertakan juga. Bila sumber ini telah disusun, tugas selanjutnya adalah mengarahkan penggunaannya untuk mengadakan aktivitas

yang direncanakan. Yang terakhir, manajer harus mengontrol aktivitas agar dapat mencapai tujuan yang telah dirancang.

Fayol percaya bahwa semua manajer menjalankan fungsi tersebut, tanpa memandang tingkatan manajer dalam suatu organisasi. Pandangan ini disebut keuniversalan fungsi manajemen, yaitu fungsi yang dilakukan oleh manajer pada semua tingkat.

Semua tingkat rencana, kecuali rencana manajer puncak, mempunyai rencana lebih panjang dari pada tingkat yang ada di bawahnya. Manajer puncak memproyeksikan aktivitas perusahaan lima, sepuluh, atau bahkan dua puluh tahun kedepan. Manajer tingkah menengah akan terlibat dalam perencanaan satu sampai lima tahun mendatang. Manajer tingkat lebih bawah hanya akan terlibat dalam pencapaian tujuan untuk tahun pada saat itu. Periode waktu yang akan datang yang menjadi tanggung jawab manajer ini disebut dengan horison perencanaan (planning horizon). Ini adalah salah satu cara untuk mengklasifikasi tingkatan manajer.

Walaupun semua level melakukan pengorganisasian, para manajer ini mengorganisasi bagian yang berbeda dari perusahaan. Manajer puncak menentukan susunan organisasi secara keseluruhan dan umum. Mengenai detail bagaimana tiap bagian diorganisasi adalah tugas manajer di bawahnya.

Fungsi pengaturan staf juga dilakukan oleh manajer pada semua tingkat, namun dengan cara yang berbeda. Manajer puncak berhubungan dengan perolehan sumber manusia yang akan menduduki jabatannya. Sebagai contoh, direktur secara pribadi akan menentukan wakil direktur, namun akan memberikan tugas pemilihan karyawan tingkat bawah kepada manajer tingkat di bawahnya.

Semua manajer mengarahkan semua sumber untuk mencapai tujuan, namun manajer tingkat puncak adalah yang paling menginginkan tercapainya tujuan umum dan jangka panjang. Manajer tingkat di bawahnya menginginkan tercapainya tujuan jangka pendek dan tertentu.

Selagi manajer mengarahkan sumber tersebut, ia melakukan kontrol atas mereka. Manajer puncak melakukan kontrol jangka panjang, sedangkan manajer di bawahnya mempunyai keterlibatan dalam pengontrolan jangka pendek.

### 2.5.2 Teori Tingkah Laku Manajemen

Dalam kasus yang sekarang dikenal dengan *Hawthorne Experiment*, team peneliti Harvard, yang dipimpin oleh Elton Mayo dan Fritz J. Roethlisberger, mempelajari pengaruh cahaya pada produktivitas terhadap para pekerja di pabrik Western Electric Hawthorne di Cicero, Illinois antara 1927 dan 1932 ("Tutoring and APA," n.d.). Produktivitas nampaknya naik tanpa penambahan, pengurangan, ataupun tetap dalam pencahayaan. Ternyata para pekerja tidak tergantung kepada pencahayaan, namun kepada perhatian yang ditujukan kepada mereka. Respon perhatian ini dikenal sebagai *Hawthorne effect*, dan eksperimen Hawthorne telah menyebabkan dimulainya studi tentang perilaku ("Tutoring and APA," n.d.).

Kontribusi mengenai studi perilaku dibuat menjadi dua kelompok, yaitu memberikan penekanan pada orang yang ada dalam pekerjaan dari pada jenis pekerjaan itu sendiri. Peneliti Hawthorne, yang merupakan bagian dari human relation movement (gerak-gerik hubungan manusia), adalah yang pertama mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai orang yang bekerja dalam organisasi ("Tutoring and APA," n.d.). Peneliti ini kemudian digabungkan

dengan ilmuwan bidang perilaku yang mempunyai pengetahuan yang lebih baik. Ilmuwan ini dikenal sebagai kelompok sistem sosial. Teknik penelitian yang lebih canggih diterapkan oleh kelompok ini. Usahanya menghasilkan kumpulan materi yang disebut *organizational behaviour* (perilaku organisasi) ... . Kelompok Sistem Sosial telah begitu mempengaruhi studi manajemen dalam pendidikan bisnis modern ...

Kelompok Sistem Sosial mengetahui kepentingan masing-masing individu, jika kelompok atau perusahaan ingin mencapai tujuannya. Mereka percaya bahwa tujuan perorangan atau kelompok harus sesuai. Oleh karena itu, ketika manajer menyusun tujuan untuk sistem, tujuan tersebut harus juga sesuai dengan tujuan perorangan.

Kelompok perilaku memberikan kontribusi yang jelas terhadap rancangan sistem informasi. Kelompok ini berkonsentrasi pada kepentingan tujuan dan cara pencapaiannya. Manajer dalam sistem bisnis tidak boleh mengabaikan petunjuk ini. Sistem bisnis bukanlah susunan mekanisme yang sederhana. Tingkat penampilannya ditentukan oleh orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kelompok perilaku memberikan gambaran cara orang-orang dimotivasi agar dapat bekerja secara bersama-sama sebagai kesatuan sistem.

### **2.5.3 Teori Kemungkinan dalam Manajemen**

Kelompok pencetus teori percaya bahwa tak ada teori yang dapat berlaku sepanjang waktu, dan bahwa keberhasilan tergantung pada situasinya. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok kemungkinan atau situasi. Kelompok ini mempunyai pengikut yang banyak karena ia memberikan fleksibilitas dalam pemecahan masalah yang kompleks dari pada kelompok lain yang hanya ditujukan pada masalah khusus dan tak menawarkan fleksibilitas ("Tutoring and APA," n.d.).



Menurut kelompok ini, faktor penting yang mempengaruhi praktek manajemen adalah lingkungan manajer. Lingkungan ini terdiri dari lingkungan eksternal (ekonomi, politik, dan pengaruh sosial pada perusahaan) dan lingkungan internal (batasan yang diakibatkan oleh sumber perusahaan). Batasan atau hambatan internal terdiri dari teknologi yang digunakan dalam proses produksi, tugas yang dijalankan oleh pekerja, dan para pekerja itu sendiri. ("Tutoring and APA," n.d.).

Manajer harus selalu menyadari adanya perubahan yang terjadi pada kedua lingkungan tersebut dan harus dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk memahami situasi yang sedang berlangsung dan mengetahui akibat dari situasi tersebut.

## **2.6 Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah**

### **2.6.1 Sejarah**

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelebagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan Narkoba, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing (Badan Narkotika Nasional, 2010).

Selanjutnya BNN menjelaskan bahwa berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971, yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya

Narkoba. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari APBN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Pada masa itu, permasalahan Narkoba di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintahan Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa permasalahan Narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya Narkoba, sehingga pada saat permasalahan Narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1977, pemerintah dan bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya Narkoba.

Menghadapi permasalahan Narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan Narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan

dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya Narkoba yang semakin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengkoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional. BNN mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba; dan
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan Narkoba.

Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan penyalahgunaan Narkoba yang terus meningkat dan semakin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN, BNP dan BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada

tingkat nasional, propinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur, dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing tidak mempunyai hubungan yang struktural vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan Narkoba yang terus meningkat dan semakin serius, maka ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Berdasarkan undang-undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan struktur vertikal ke propinsi dan kabupaten/kota. Di propinsi dibentuk BNN Propinsi, dan di kabupaten/kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama dan 5 (lima) Deputi, yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

## **2.6.2 Visi dan Misi**

Visi yang ditetapkan Badan Narkotika Nasional adalah "Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kemerterian yang profesional dan mampu menyatukan langkah seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif Lainnya".

Sedangkan Misi yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional adalah "Bersama instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, bangsa, dan negara melaksanakan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif lainnya".

## **2.6.3 Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)**

### **2.6.3.1 Kedudukan dan Tugas Pokok**

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala BNN.

Sedangkan Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan

- penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
  5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  7. Melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
  9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
  10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### 2.6.3.2 Fungsi

Adapun fungsi Badan Narkotika Nasional sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.

6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang Narkotika, Psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika dan Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu Narkotika dan



Psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.

15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

## **BAB 3 GAMBARAN UMUM**

### **3.1 Sejarah Berdirinya Yayasan Cinta Anak Bangsa**

Seperti telah disebutkan pada bagian iatar belakang sebelumnya bahwa YCAB didirikan pada tahun 1999 dengan diketuai oleh Veronica Colondam. Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) didirikan sebagai yayasan sosial yang mandiri dan tidak mencari keuntungan pada tahun 1999. YCAB dibangun atas dasar keprihatinan terhadap meningkatnya kasus penyalahgunaan Narkoba di kalangan pemuda Indonesia.

Menurut Ketua Umum YCAB, Veronica Colondam yang mendasari berdirinya Yayasan Cinta Anak Bangsa adalah karena YCAB mau mencegah anak bangsa menggunakan Narkoba. Tambahnya, selama ini, perlu dicatat kita tidak berhadapan dengan pecandu atau mengurus yang sudah kena, jadi kita menjaga yang belum kena.

YCAB merupakan salah satu anggota Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama (Bersama), yang dipimpin oleh bapak Dr. dr. H. Hadiman, SH., MSc., sebagai Ketua Umum Bersama. Dimana Bersama merupakan payung atau wadah organisasi Non-Pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli akan permasalahan Narkoba di Indonesia. Bersama sebagai wadah koordinasi organisasi non-pemerintah yang peduli masalah Narkoba selalu berupaya mendukung peran BNN dalam upaya P4GN dengan mendorong anggota atau mitra Bersama untuk terus berkarya menyehatkan bangsa dengan program-program yang bersifat taktis maupun strategis.

Terkait dengan hal tersebut di atas, YCAB sebagai salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap permasalahan Narkoba di Indonesia melaksanakan program-program yang fokus utamanya adalah pencegahan Narkoba primer di sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas.

Dan selain itu YCAB memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada remaja putus sekolah. Program YCAB berikutnya adalah memperkenalkan program-program pengembangan daerah yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan rutin bagi masyarakat untuk mendukung perbaikan kesehatan dan lapangan kerja di komunitas-komunitas, khususnya di daerah miskin dan rawan bencana di Indonesia.

### **3.2 Visi dan Misi serta Nilai-nilai yang dianut YCAB**

Visi Yayasan Cintaan Anak Bangsa adalah berdasarkan kasih dan keprihatinan yang mendalam, kami ingin memberikan harapan untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa.

Berkaitan dengan Visi tersebut, Misi YCAB adalah:

1. Menyelamatkan kehidupan dan pemikiran kaum muda Indonesia melalui program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang membawa kesadaran, pendidikan dan pengembangan masyarakat.
2. Membuat masyarakat meniru usaha yang kami lakukan, dengan membuat dan menyediakan riset yang terjangkau berdasarkan program-program kami.
3. Mempiori program-program pengembangan yang mencetak SDM, kolaborasi antara tiga sektor dan kewirausahaan sosial.

Selain Visi dan Misi tersebut di atas, YCAB memiliki Nilai-nilai yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Adapun Nilai-nilai tersebut adalah:

1. Kami yakin bahwa setiap anak memiliki keunikan dan kesempatan berharga.
2. Kami yakin bahwa setiap anak mempunyai hak untuk merasa aman dan bebas dari kemiskinan.

3. Kami yakin bahwa setiap anak berhak mendapatkan informasi dan pendidikan: informasi yang membebaskan mereka untuk membuat pilihan-pilihan cerdas; pendidikan yang membuat mereka mampu mengatur hidup mereka sendiri.
4. Kami yakin, dengan menyediakan dan merawat nilai-nilai kebaikan, YCAB mampu membantu penyelenggaraan dalam mengembangkan dan menyampaikan program-program kaum muda di Indonesia, dan di luar Indonesia.

### 3.3 Strategi YCAB dalam P4GN

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, menurut YCAB (2010) bahwa sejalan dengan berkembangnya program-program, YCAB mulai melihat adanya hubungan erat antara kemiskinan dengan penyalahgunaan Narkoba. YCAB memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada remaja putus sekolah yang tak lain komponen utama strategi pencegahan primer, dan YCAB berhasil mengurangi kecenderungan keterlibatan dalam perilaku dan lingkungan yang berisiko tinggi dalam penyalahgunaan Narkoba.

Langkah terakhir dari pengembangan program YCAB adalah memperkenalkan program-program pengembangan daerah, sehingga menghasilkan pendapatan rutin masyarakat untuk mendukung perbaikan kesehatan dan lapangan kerja di komunitas-komunitas secara langgeng di daerah-daerah miskin dan rawan bencana di Indonesia.

YCAB berusaha untuk membuat perbedaan jangka panjang dalam kehidupan para siswa dan para peserta program YCAB. Walaupun hal itu sulit dicapai dan bahkan sulit diukur, yang membuat YCAB terus maju adalah kemampuan untuk mengubah kehidupan seorang anak menjadi lebih baik dan menjaga orang-orang tetap sehat dan bebas narkoba.

Hal yang umum pada seluruh program-program YCAB adalah pengembangan sebuah pemahaman tentang keahlian kehidupan. Hal ini membantu para peserta untuk mengenali dan berurusan dengan perasaan mereka, untuk membuat tujuan-tujuan yang realistis dan dapat tercapai, serta membantu mereka mengembangkan strategi pemecahan masalah mereka sendiri. Materi-materi ini membantu para peserta untuk berinteraksi lebih baik dengan keluarga, teman dan guru, dan yang terpenting adalah membuat mereka mampu merancang masa depan mereka sendiri. Dirangkai dengan informasi terbaru tentang Narkoba, YCAB berharap dapat membantu peserta untuk tetap memilih bebas dari Narkoba.

Sebagai hasil langsung dari penyelenggaraan program “Drug Free Life”, YCAB menemukan bahwa banyak pemakai Narkoba adalah kaum muda yang telah kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, atau mempunyai keahlian yang kurang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Untuk membantu menyelesaikan situasi tersebut, YCAB membangun sebuah pusat pelatihan kejuruan yang disebut dengan Rumah Belajar YCAB Foundation. Pada operasi tahun pertamanya yaitu tahun 2003, pusat pelatihan tersebut menyediakan kursus yang bervariasi untuk anak-anak kurang mampu yang berada di wilayah sekitar dan memfokuskan diri pada aktifitas untuk anak-anak yang keluarganya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Sampai saat ini telah dibuka tiga Rumah Belajar yang berlokasi di Duri Kepa, Plumpang-Jakarta Utara dan Cikarang. Dengan kualifikasi yang layak, banyak murid-murid yang telah mendapatkan pekerjaan yang pada awalnya tidak mampu mereka dapatkan.

YCAB dalam melakukan upaya-upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba agar menjadi lebih efektif, bekerjasama dengan organisasi-organisasi yang mempunyai visi dan misi yang sama, seperti di Yogyakarta, bekerjasama dengan Multistrada, yaitu membimbing masyarakat dengan memberikan bahan-bahan material untuk sekolah yang rusak, melengkapi mereka dengan computer, listrik, karpet dan pompa air yang mereka butuhkan untuk meyakinkan bahwa anak-anak di propinsi tersebut akan

melanjutkan pendidikan mereka. Kemudian tujuan jangka panjang adalah membuat 100 rumah baru dalam daerah bencana dimulai.

Di Nias, dengan hancurnya infrastruktur oleh gempa bumi berkekuatan 8,7 skala richter pada bulan Maret 2005 yang mengikuti gempa pada bulan Desember 2004, YCAB bekerja sama dengan organisasi partner United in Diversity membentuk Delasiga Cinta Anak Bangsa (DCAB). Misinya adalah untuk membangun kembali kehidupan, rumah dan semangat komunitas di pulau tersebut. Proyek tersebut dimulai dengan pembangunan 239 rumah, sebuah sekolah, sebuah klinik, sebuah gereja dan sebuah mesjid di kelurahan Sirombu di pulau tersebut.

Di Aceh, melalui sebuah konsorsium yang dikenal dengan TRIBAL (Tsunami Rehabilitation in Banda Aceh Livelihood), YCAB adalah bagian dari sebuah proyek yang disponsori Relawan PBB (UNV) yang dibentuk untuk membangun kembali pemukiman, kehidupan, dan ekonomi masyarakat Aceh, diantaranya adalah:

1. YCAB bersama dengan anggota lain TRIBAL consortium bekerjasama untuk melatih masyarakat lokal ketrampilan menjahit, dan produk-produknya kemudian dijual, dan pendapatannya dibagikan berdasarkan asas kerjasama.
2. Pengalaman YCAB di bidang pelatihan Teknologi Informasi di RBCAB membuat YCAB mampu untuk mendirikan sebuah pusat pelatihan dan warung internet di Banda Aceh yang berfungsi sebagai pembelajaran Teknologi Informasi dan bantuan untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Warung internet tersebut meningkatkan pendapatan yang dapat membantu kelangsungan program tersebut ketika ditangani oleh masyarakat lokal.
3. Ketrampilan konseling juga diajarkan pada anggota masyarakat lokal untuk membuat mereka mampu merangkul dan menolong sesama di sekitar mereka.

## BAB 4 METODE PENELITIAN

### 4.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam ilmu-ilmu sosial, selama ini mengenal dua paradigma dalam mendekati masalah. Paradigma ini membantu peneliti dalam memahami tentang fenomena sosial, bagaimana ilmu pengetahuan dapat terbentuk, dan apa yang mempengaruhi masalah, pemecahannya, serta kriteria dari bukti-bukti ilmiah yang ditemukan (Cresswell, 1994). Paradigma pertama adalah positivisme dan kedua adalah fenomenologis (Taylor & Bogdan, 1984; Orford, 1992).

Pada paradigma pertama, pemahaman tentang permasalahan sosial didasari pada pengujian teori yang disusun dari berbagai variabel, pengukuran yang melibatkan angka-angka, dan dianalisa menggunakan prosedur statistik. Paradigma ini konsisten dengan apa yang disebut pendekatan kuantitatif, dengan tujuan untuk meramalkan generalisasi suatu teori. Sedangkan paradigma yang kedua adalah pendekatan kualitatif, yaitu proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata, dan diperoleh dari situasi yang alamiah.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dimana proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh (*holistic*), dibentuk oleh kata-kata tertulis atau lisan, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Dengan demikian, alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah untuk memahami pengertian yang mendalam tentang fenomena sosial dengan memahami suatu gejala, fakta atau realita yang terdapat pada masalah sosial yang diteliti oleh penulis. Hal tersebut

hanya dapat dipahami, bila penulis menelusuri secara mendalam dan tidak hanya terbatas pada pandangan di permukaan saja.

#### **4.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang diambil adalah di DKI Jakarta. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan efektivitas LSM sebagai mitra BNN yang menjadi tema penelitian ini berada pada lokasi tersebut dan sebagian telah dikenal peneliti sebelumnya sehingga hal ini diharapkan sebagai modal utama dalam mengefektifkan penggunaan waktu dan mengefisienkan pengeluaran dana yang berlebihan.

#### **4.3 Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yang terdiri dari Informan Kunci, Informan Penting dan Informan Tambahan. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lofland and Lofland dalam Moleong, 1997). Dengan demikian jenis data dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sedangkan sumber data tertulis seperti dokumen merupakan tambahan. Sumber data sebagaimana tersebut di atas dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Data Primer**, yakni data yang bersumber pada informan

Responden dalam penelitian kualitatif disebut informan kunci, penting dan tambahan. Informan adalah orang-orang yang dalam study penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi melalui proses wawancara. Jadi pada intinya informan merupakan orang-orang yang mengetahui seluk-beluk permasalahan yang diteliti atau orang-orang yang dapat dimintakan pertimbangannya mengenai permasalahan permasalahan yang diteliti



oleh penulis. Melalui proses wawancara, penulis bertujuan untuk memperoleh data yang dapat diolah untuk mendapatkan generalisasi atau hal-hal yang bersifat umum yang menunjukkan kesamaan dengan situasi-situasi lain, sekalipun keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan subyektif, merupakan tugas penulis untuk menemukan keterangan yang lebih obyektif.

Dalam penelitian ini, maka informan yang akan dapat memberikan informasi adalah salah seorang anggota YCAB dan seorang pejabat yaitu Deputy Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional (BNN) serta anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN dan YCAB.

## 2. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, selain melalui proses wawancara, penulis juga akan meneliti sejumlah data-data tertulis yang didapatkan dari pihak informan. Dengan adanya data sekunder, penulis bertujuan untuk dapat memperkaya gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

## 4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, pengamatan dan studi kepustakaan. Dengan demikian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan, yaitu turun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang apa yang diteliti, dengan teknik-teknik sebagai berikut:
  - a. Observasi dan pengamatan, yaitu dengan wawancara mendalam atau pengumpulan data dengan tanya jawab kepada informan yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan dan menggali

informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang masih bersifat umum yang selanjutnya dikembangkan dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik sesuai dengan situasi di lapangan.

- b. Penelitian dokumen, yaitu pengumpulan data dengan meneliti catatan maupun arsip-arsip pada informan terkait.
2. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dari literature, peraturan perundang-undangan, makalah (hasil penelitian sebelumnya), jurnal, artikel dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

#### 4.5 Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian deskriptif. Setelah data dikumpulkan, kemudian menyederhanakan data yang diperoleh dalam bentuk yang sederhana sehingga mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasi untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan model interaktif. Dalam proses analisis ini terdapat analisis yang bersifat reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan (Milles & Huberman dalam Soetrisno, 2001: 87-88), sebagai berikut:

1. Reduksi data, proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data; membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Menarik kesimpulan/verifikasi; penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan kembali atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

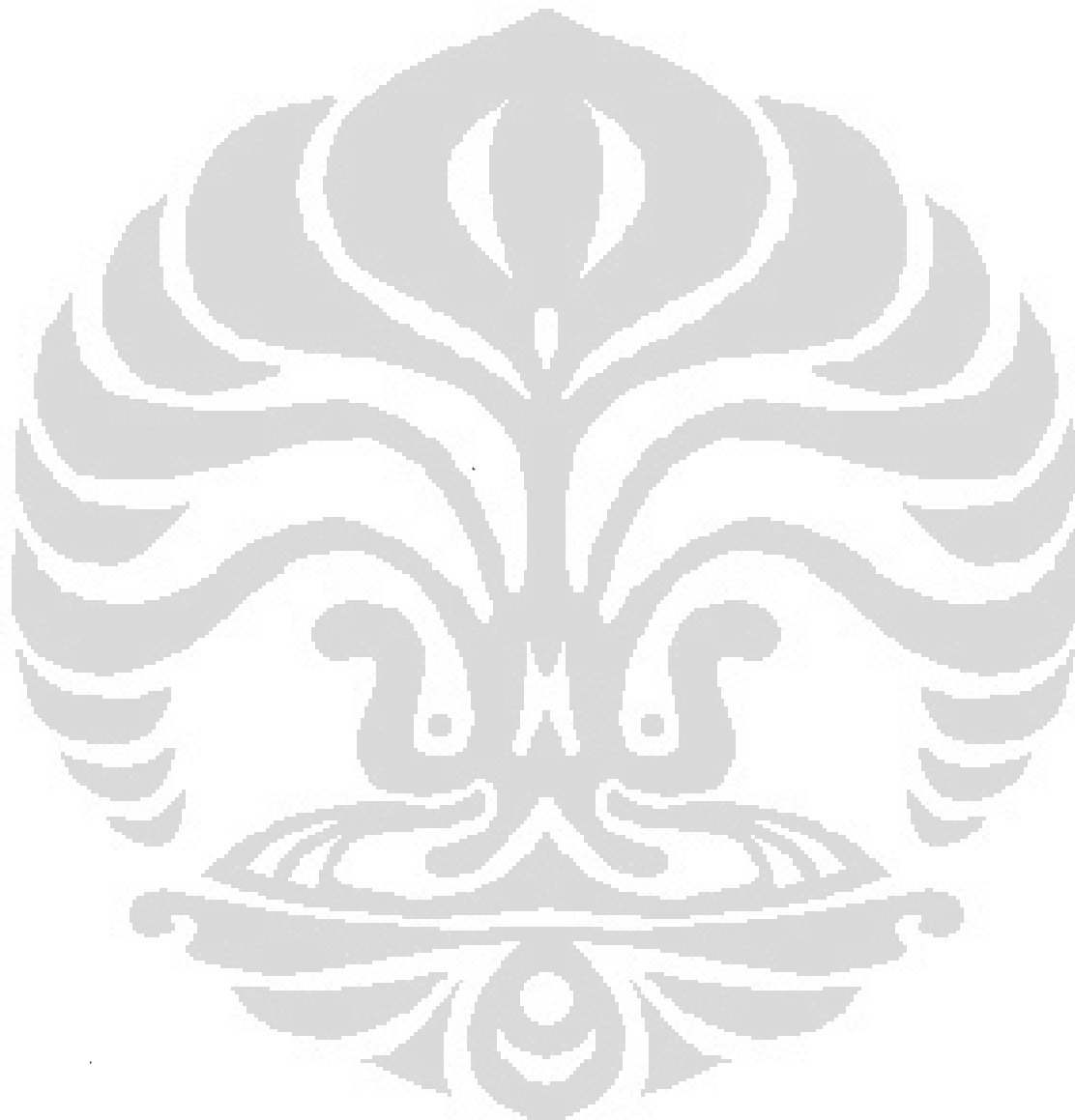
Dengan demikian model analisis interaktif dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam pengumpulan data dengan model ini, penulis selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Artinya berdasarkan data yang ada pada *field note* (catatan yang didapat dari lapangan) penulis akan menyusun pemahaman arti dari segala peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan data, untuk mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti berusaha menarik kesimpulan dengan verifikasinya berdasarkan *field note*.

Sifat penelitian fleksibel, walaupun menggunakan strategi riset deskriptif dengan kegiatan penelitian yang dirumuskan/disusun. Dalam penelitian ini hasil akhir ditentukan oleh pengumpulan data yang mencerminkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

#### **4.6 Operasionalisasi Faktor-Faktor Yang Akan Diteliti**

Karena luasnya objek yang diteliti yakni LSM yang dalam penelitian ini adalah YCAB yang bekerjasama dengan BNN dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, maka penulis membatasi diri pada

beberapa faktor yang dipandangan terkait erat dengan proses internal pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh YCAB dengan BNN. Adapun secara konseptual proses internal terdiri dari komponen-komponen input, proses, output, outcome dan feedback, dengan demikian secara operasional, operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti dan pedoman wawancara dapat diijelaskan sebagaimana terlampir.



## **BAB 5**

### **HASIL PEMBAHASAN**

Dalam Bab 5 ini peneliti akan mencoba membahas pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagaimana telah disebutkan pada Bab 1 yaitu pada bagian Perumusan Masalah. Dan berdasarkan pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode kualitatif, dimana proses pencarian data untuk memahami masalah sosial yang didasari pada penelitian yang menyeluruh, dibentuk oleh kata-kata tertulis atau lisan, dan diperoleh dari situasi yang alamiah. Adapun proses pencarian data, yaitu dengan menggunakan observasi ke lapangan melalui proses wawancara dan meneliti sejumlah data-data tertulis.

Terkait dengan hal tersebut, dalam proses pencarian data peneliti menggunakan beberapa informan, yaitu YCAB, Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN dan Masyarakat setempat yang menjadi sasaran program P4GN yang diwakili oleh Ketua III Bidang Humas Fasilitator Kampung Permata dan Ketua II Fasilitator Kampung Permata. Adapun proses pencarian data yaitu mengacu kepada operasionalisasi faktor-faktor yang akan diteliti dan pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun oleh peneliti.

Berikut beberapa operasionalisasi faktor-faktor yang diteliti oleh penulis yang berkaitan dengan pembahasan materi:

1. **Profile YCAB:**

Merujuk pada Visi dan Misi yang dianut serta kegiatan-kegiatan yang dijadikan program dalam pencegahan bahaya Narkoba.

2. **SDM YCAB:**

Merujuk pada jumlah personel, jumlah tenaga ahli yang dilibatkan, dan kualitas tenaga ahli, serta mekanisme rekrutmen personel dan tenaga ahli.

3. **Anggaran Kegiatan:**  
Merujuk pada kebutuhan anggaran, baik dalam 1 tahun maupun dalam satu kegiatan serta sumber anggaran yang dibutuhkan.
4. **Bentuk-bentuk kegiatan:**  
Merujuk pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan, dan kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan dan strategi BNN.
5. **Metode pelaksanaan kegiatan:**  
Merujuk pada standarisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan kegiatan yang ideal dalam rangka penanggulangan bahaya Narkoba.
6. **Efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan:**  
Merujuk pada metode kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan serta tolak ukur yang digunakan.
7. **Waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap pelaksanaan program kegiatan:**  
Merujuk pada waktu yang diperlukan serta kondisi daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.
8. **Hasil kegiatan:**  
Merujuk pada hasil kegiatan yang telah dilaksanakan, dan kondisi daerah Kampung Permata yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat serta arah kebijakan dan strategi BNN.
9. **Evaluasi terhadap metode kegiatan yang dilaksanakan:**  
Merujuk pada metode kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Permata, dan arah kebijakan strategi BNN serta sikap masyarakat Kampung Permata terhadap metode kegiatan yang dilaksanakan maupun kesadaran masyarakat tentang bahaya Narkoba, dan status kehidupan masyarakat artinya adakah perubahan yang terjadi pada status kehidupan masyarakat.

10. Tindak lanjut setelah program kegiatan dilaksanakan:  
Merujuk pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata yang telah dilaksanakan, serta adakah tindak lanjut dari program tersebut.
11. Parameter keberhasilan metode yang digunakan:  
Merujuk pada hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata serta tolak ukur keberhasilan dari metode yang digunakan.
12. Sasaran yang ingin dicapai:  
Merujuk pada metode kegiatan pemberdayaan masyarakat yang digunakan serta sasaran yang dituju dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata.
13. Persentase keberhasilan program:  
Merujuk pada hasil kegiatan serta persentase keberhasilan dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata.
14. Controlling, monitoring, pendampingan terhadap daerah yang telah selesai menjalani program kegiatan:  
Merujuk pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata yang telah selesai dilaksanakan serta tindak lanjut yang dilakukan terhadap Kampung Permata yang telah menjalani program kegiatan pemberdayaan masyarakat.
15. Jumlah daerah yang telah berhasil menjalani program kegiatan:  
Merujuk pada jumlah daerah yang menjalani program kegiatan pemberdayaan masyarakat serta hasil dari program kegiatan tersebut.
16. Kepuasan masyarakat:  
Merujuk pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung Permata serta metode kegiatan yang digunakan maupun pelayanan yang diberikan oleh LSM YCAB dan BNN.

17. Persepsi masyarakat:

Merujuk pada program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan serta hasil dari program kegiatan tersebut terhadap Kampung Permata.

18. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan:

Merujuk pada proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung Permata.

19. Upaya-upaya perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan:

Merujuk pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung Permata serta kendala-kendala yang ditemukan selama proses kegiatan dilaksanakan.

20. Hubungan kerjasama antara BNN dan LSM YCAB:

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung permata oleh BNN dan LSM YCAB serta hubungan kerjasama yang terjadi.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penelitian dilakukan terhadap 1 (satu) LSM yaitu YCAB, dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat serta Daerah yang menjadi sasaran program kegiatan yaitu Kampung Permata Cengkareng, Jakarta Barat. Adapun alasan peneliti melakukan penelitian kepada LSM YCAB adalah karena LSM YCAB telah bekerjasama dengan BNN dalam melaksanakan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, sedangkan penelitian yang dilakukan kepada Deputi Pemberdayaan Masyarakat adalah dikarenakan sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba, serta penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada Kampung Permata dikarenakan daerah tersebut merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN dan LSM YCAB.



### **5.1 Eksistensi Program-program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Daerah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada para informan tersebut di atas, dapat digambarkan mengenai hasil-hasil program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Adapun proses penelitian terhadap para informan tersebut adalah sebagai berikut:

Terkait pada Visi dan Misi LSM YCAB yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya bahwa tujuan dari visi dan misi tersebut adalah untuk memberikan harapan akan kehidupan dan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak bangsa melalui kegiatan-kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada sumber informan dari YCAB yaitu saudari Yulinda Pangabean bahwa secara umum kegiatan-kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh YCAB adalah, seperti penyuluhan tentang bahaya Narkoba, memberikan bantuan pendidikan dan pelatihan kejuruan kepada remaja putus sekolah dan membangun sebuah pusat pelatihan kejuruan yang disebut dengan Rumah Belajar YCAB Foundation serta memperkenalkan program-program pengembangan daerah.

Selanjutnya Yulinda Pangabean mengatakan bahwa jumlah personel YCAB adalah sebanyak 30 orang, dimana personel yang bergabung dengan YCAB merupakan sumber daya manusia yang memiliki kepedulian dan keprihatinan terhadap permasalahan bangsa khususnya dalam penyalahgunaan Narkoba. Mereka berasal dari latar belakang pendidikan dan profesi yang berbeda, namun keinginannya untuk membantu bangsa ini dari permasalahan penyalahgunaan Narkoba sangat tinggi. Adapun Sumber Daya Manusia YCAB, antara lain dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pendiri selaku Ketua YCAB Veronica Colondam, sebelum mendirikan YCAB ia aktif di kegiatan anti Narkoba. Veronica mengambil jurusan Komunikasi Massal dan Hubungan Masyarakat untuk gelar Sarjanannya dan mendapatkan gelar MSc. di program studi Kebijakan dan Intervensi Narkoba dari *Imperial College London*, dan *The London Scholl of Hygiene and Tropical Medicine*. Pada Tahun 2001, di usianya yang ke 29 ia adalah sosok ternuda yang pernah menerima penghargaan the United Nations' Vienna Civil Society Award. Dan YCAB di bawah Veronica juga berupaya maksimal dalam menggerakkan media massa membentuk opini publik tentang penyalahgunaan Narkoba dan mempengaruhi pemerintah, melalui organ Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk segera membuat kebijakan pencegahan primer terhadap narkoba. Atas berbagai perjuangannya itu, Veronica menerima National Gold Award dari Presiden Indonesia pada tahun 2003.
2. Iskandar Irwan Hukom adalah katalis utama dalam membangun YCAB, ia sangat membantu untuk membentuk organisasi dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden 1999-2002. Iskandar Irwan Hukom saat ini memegang posisi Sekretaris Jenderal YCAB. Ia mendapatkan gelar dalam kedokteran dari Universitas bergengsi Indonesia pada tahun 1985. Setelah itu ia mengkhususkan diri dalam anestesi pada Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Dia kemudian menjabat sebagai Kepala Perawatan Stres terkait Narkotika di Yayasan Doulos antara tahun 1993 sampai tahun 1998. Dari tahun 1999-2002 ia adalah Presiden Rehabilitasi Getsemani Pusat.
3. Yulinda Pangabean, bergabung dengan YCAB pada tahun 2000, di YCAB ia bekerja pada hubungan masyarakat, kemudian ia ditunjuk sebagai Manajer Hubungan Manusia di YCAB. Sebelumnya Yulinda Pangabean bekerja pada posisi yang menangani berbagai proyek-proyek khusus. Ia belajar ekonomi di Universitas Kristen Indonesia dan Pemasaran di Prasetya Mulia Universitas, Jakarta.

4. Sri Mulia Sangtoki telah memegang posisi Bendahara di YCAB sejak tahun 2003. Karena itu dia saat ini memimpin Operasi internal YCAB. Sebelumnya di YCAB, ia bekerja sebagai Senior Auditor di KPMG Hanadi dan Sujendro pada tahun 1993-1995 dan sebagai Internal Auditor untuk Grup PSP pada tahun 1995-1997 dan Trimegah Securities sebagai anggota Keuangan dan Akuntansi pada tahun 1997-2003. Dia menyelesaikan studinya di Fakultas Ekonomi, Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1993.
5. Meena K. Adnani, Managing Director, sejak ia bergabung dengan YCAB pada 2008, Tanggung jawab Meena telah disertakan dengan Penggalangan Dana, (melalui sponsor dan Kegiatan CSR), Public Relations dan Pemasaran serta Hubungan Media. Ia memiliki latar belakang hukum yang kuat dan telah bekerja di Multi National Perusahaan di Indonesia, Singapura dan Inggris. Meena memegang Bachelors of Hukum (LLB) dengan Honors dari Universitas London, Inggris. Dia juga memenuhi syarat untuk praktek hukum di Inggris dan Wales serta New York.

Sedangkan untuk tenaga ahli, biasanya YCAB menggunakan para pengajar yang berkompeten di bidangnya. Contohnya, kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan di Kampung Permata, YCAB bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Bina Nusantara (Binus) baik dalam hal pengajar, materi yang digunakan maupun tanda kelulusan berasal dari lembaga tersebut.

Terkait dengan sumber anggaran yang diperoleh oleh LSM YCAB adalah berasal dari rekan kerja yang peduli dengan permasalahan bangsa, khususnya terhadap permasalahan penyalahgunaan Narkoba, seperti PT. YADA Indonesia (Youth Against Drug Abuse) yang didirikan pada Tahun 2000 dengan tujuan menciptakan keuntungan yang dapat disalurkan ke YCAB untuk program kampanye anti Narkoba di seluruh Indonesia. Dan PT. Pelangi Jaya yang didirikan pada Tahun 2004 dengan tujuan

menyediakan pendidikan non formal untuk anak-anak dan juga program pendidikan dan pelatihan singkat untuk para orang tua dan guru. Ada berbagai macam kursus dan program yang ditawarkan oleh Pelangi, dan keuntungannya disalurkan untuk membantu kampanye-kampanye anti Narkoba YCAB. Selanjutnya Yulinda Pangabean mengatakan bahwa masih ada rekan kerja lainnya yang membantu YCAB dalam pendanaan serta pendanaan yang diperoleh berasal juga dari kegiatan berbagai acara amal. Sedangkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, khususnya kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh YCAB berasal dari BNN.

Menurut Yulinda Pangabean kegiatan-kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh YCAB sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti kegiatan penyuluhan di lingkungan pendidikan dan tempat tinggal, dimana pemahaman dan kesadaran tentang bahaya Narkoba menjadi meningkat, selain itu Pusat Pelatihan Kejuruan Rumah Belajar YCAB Foundation, yang pada operasi pertamanya yaitu pada tahun 2003, telah menyediakan kursus yang bervariasi untuk anak-anak kurang mampu yang berada di wilayah sekitar dan memfokuskan diri pada aktivitas untuk anak-anak yang keluarganya tidak mampu membayar biaya pendidikan. Sampai saat ini, telah dibuka tiga Rumah Belajar yang berlokasi di Duri Kepa, Plumpang Jakarta Utara dan Cikarang. Dengan kualifikasi yang layak, dan banyak murid-murid yang telah mendapatkan pekerjaan yang pada awalnya tidak mampu mereka dapatkan.

Selanjutnya Yulinda Pangabean menjelaskan bahwa untuk program BNN yang telah dilaksanakan oleh YCAB seperti kegiatan pelatihan komputer di Kampung Permata sudah cukup efektif, hal tersebut terbukti dengan diterimanya BNN dan YCAB dalam melaksanakan kegiatan tersebut, dimana Warga Kampung Permata menyambut baik dan mereka sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut. Begitu juga dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh BNN sendiri, yaitu seperti pelatihan ketrampilan menjahit, bordir, dan salon dimana masyarakat

menyambut baik dan antusias. Selanjutnya Yulinda Pangabean mengatakan bahwa manfaat yang dirasakan dari kegiatan-kegiatan tersebut yaitu terciptanya kemampuan ketrampilan dari peserta pelatihan atau dengan kata lain dari yang awalnya tidak mengerti menjadi mengerti.

Menurut Yulinda Pangabean bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh YCAB melalui kegiatan pelatihan komputer, dimana para peserta yang terlibat didalamnya terdiri dari anak-anak usia sekolah tingkat dasar (SD) dan Remaja (SMP). Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan tersebut, dan dampak yang dirasakan cukup baik, yaitu mereka yang pada awalnya tidak memahami tentang materi-materi yang disampaikan menjadi paham atau mengerti. Namun kendala yang dihadapi oleh YCAB adalah masalah pengaturan waktu atau jadwal kegiatan. Dimana YCAB harus menyesuaikan dengan jadwal para peserta, mengingat para peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan komputer satu sama lain memiliki jadwal sekolah yang berbeda. Sehingga pelatihan komputer yang dilaksanakan mengalami perubahan jadwal.

Terkait dengan hal tersebut di atas, menurut Yulinda Pangabean bahwa hendaknya program-program BNN khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan program-program yang berkesinambungan atau tidak sesaat, contohnya seperti kegiatan yang telah dilaksanakan oleh YCAB seperti kegiatan pelatihan komputer maupun yang telah dilaksanakan oleh BNN sendiri seperti pelatihan kursus menjahit, bordir dan salon seharusnya dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga para peserta yang mengikuti program tersebut mendapatkan ketrampilan sampai pada tingkat yang lebih mahir dan tidak hanya sampai pada tingkat dasar saja. Bahkan jika memungkinkan ketika mereka sudah menjadi mahir, BNN diharapkan dapat menyalurkan atau mempromosikan mereka untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang mereka miliki. Maksud dari hal tersebut, agar warga yang telah berhasil mengikuti program kegiatan dan sudah bekerja dapat dijadikan contoh untuk warga yang lain, dan pada akhirnya warga yang belum terlibat dalam kegiatan pemberdayaan

masyarakat dapat tumbuh rasa kepercayaannya kepada BNN bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat membawa manfaat dan keuntungan bagi mereka. Sehingga dari hal tersebut, diharapkan penurunan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada daerah yang menjadi sasaran program kegiatan, khususnya dalam hal ini Kampung Permata dapat dirasakan.

Selain hal tersebut di atas, BNN hendaknya melakukan upaya-upaya kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait, baik dengan Depnaker, Depkes maupun dengan Depsos. Hal ini dimaksudkan untuk membantu BNN dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Kampung Permata. Misalkan, BNN meminta bantuan kepada Depnaker untuk mempromosikan atau menyalurkan masyarakat yang sudah memiliki ketrampilan untuk mendapatkan pekerjaan, hal ini bertujuan agar kepercayaan diri mereka tumbuh dan mereka dapat dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya. Begitu pula dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya yang terjadi di Kampung Permata.

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada LSM YCAB, peneliti melakukan penelitian pada Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN dengan mewawancarai bapak Agus Suparja sebagai Kasi Lingkungan Kerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN. Adapun proses wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Menurut Agus Suparja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB di Kampung Permata adalah kegiatan pelatihan komputer, namun sebelum adanya perubahan struktur organisasi BNN yang pada saat itu kegiatan BNN di Kampung Permata dilaksanakan oleh Pus Cegah BNN, LSM YCAB sudah bekerjasama dengan BNN.

Selanjutnya menurut Agus Suparja kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh YCAB di Kampung

Permata sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan tersebut, serta hasil yang dirasakan cukup efektif karena sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dimana pengetahuan masyarakat menjadi bertambah terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Diharapkan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya pada Kampung Permata, dan untuk itu dibutuhkan waktu untuk memuiihkan kondisi tersebut serta waktu yang dibutuhkan tergantung dari kerawanan wilayah yang bersangkutan.

Selanjutnya Agus Suparja menambahkan bahwa secara umum yang menjadi sasaran dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat diantaranya adalah instansi pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan dan tempat tinggal yang menjadi daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Dan menurutnya metode kegiatan tersebut sudah tepat pada sasaran, karena daerah-daerah tersebut kerap kali rentan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Penelitian selanjutnya, peneliti melakukan penelitian kepada salah satu daerah yang menjadi sasaran dari program-program BNN melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB yaitu di Kampung Permata. Proses penelitian yang dilaksanakan dengan mewawancarai dua informan yang berasal dari Kampung Permata, yaitu ibu Shenda Lohy sebagai Ketua III Bidang Humas Fasilitator Kampung Permata dan ibu Agnes Pattiwael yang merupakan Ketua II Fasilitator Kampung Permata. Adapun proses wawancara adalah sebagai berikut:

Menurut Ketua III Bidang Humas Fasilitator Kampung Permata yaitu Ibu Shenda Lohy, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di lingkungannya hasilnya belum memuaskan, karena belum mengenai sasarannya terutama terhadap para penjual dan pemakai Narkoba. Dimana kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan baru mampu menyentuh ibu-ibu

rumah tangga dan anak-anak, sedangkan untuk para pemudanya kegiatan yang dilaksanakan belum mampu menyentuh mereka.

Selanjutnya ibu Shenda Lohy mengatakan bahwa metode yang digunakan dalam program kegiatan pemberdayaan masyarakat belum tepat, karena menurutnya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata harus diimbangi dengan tindakan represif kepada para bandar bukan hanya sekedar melaksanakan kegiatan pemberdayaan saja.

Menurut Shenda Lohy, program kegiatan yang telah dilaksanakan belum mampu memberikan kontribusi yang positif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kampung Permata, karena menurutnya pihak BNN seharusnya turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan-pendekatan secara pribadi kepada para pengguna Narkoba, sehingga diharapkan dari pendekatan tersebut dirasakan hasilnya.

Sedangkan menurut Ketua II Fasilitator Kampung Permata Agnes Pattiwael yang merupakan salah satu Fasilitator Kampung permata, mengatakan bahwa program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Permata sangat baik, karena respon dari masyarakat cukup baik, mereka antusias untuk mengikuti semua kegiatan, seperti ketrampilan menjahit, bordir, salon dan komputer.

Menurut Agnes Pattiwael, metode kegiatan yang digunakan kurang tepat, karena diharapkan ada kelanjutan dari semua kegiatan yang ada, kemudian untuk semua program perlu disosialisasikan lebih awal. Selanjutnya Agnes Pattiwael mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh LSM YCAB dan BNN cukup baik, tetapi perlu adanya kerjasama dan koordinasi yang baik diantara YCAB dan BNN sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Menurut hemat peneliti, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada informan-informan tersebut di atas, dan yang berpedoman pada hasil wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang



berkembang, bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba hasilnya baru sebatas diterimanya BNN dan LSM YCAB dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, tetapi hasil kegiatan yang berdampak pada menurunnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba belum dapat dirasakan. Hal ini terbukti dengan diselenggarakannya berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB seperti kegiatan pelatihan komputer dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BNN sendiri seperti, kegiatan pelatihan menjahit, bordir, salon, dan olahraga futsal maupun basket, dimana para peserta yang mengikuti kegiatan tersebut terdiri dari ibu-ibu rumah tangga, anak-anak usia sekolah tingkat dasar (SD) dan Remaja, tetapi untuk para pemuda tidak ada yang ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan tersebut, mengingat Para Pemuda Kampung Permata sebagian besar terkontaminasi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh LSM YCAB dan BNN belum mampu melibatkan Para Pemuda Kampung Permata untuk ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, sehingga hal ini dapat dijadikan tolak ukur bahwa menurunnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Kampung Permata belum dapat dirasakan. Karena salah satu masyarakat yang menjadi sasaran dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dalam hal ini adalah Para Pemuda Kampung Permata belum dapat disentuh oleh kegiatan-kegiatan tersebut. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung Permata belum sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN, yaitu mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. sehingga program-program BNN khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB dan BNN di Kampung Permata belum bisa dikatakan berhasil atau efektif karena hasil yang diharapkan untuk menciptakan lingkungan bebas Narkoba di wilayah tersebut belum terwujud.

Terkait dengan hal tersebut di atas, mengacu pada apa yang disampaikan oleh Sumaryadi dalam teorinya (2005: 105) berpendapat dalam bukunya "Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah" bahwa organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian mengacu pada teori tersebut, menurut hemat penulis bahwa program-program BNN khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung permata belum sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN, yaitu menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Adapun arah kebijakan dan strategi BNN dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut, melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui Strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba.

Terkait dengan program-program BNN dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan di Kampung Permata bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat, artinya potensi yang dimiliki baik itu suatu ketrampilan atau pun keahlian harus dapat dikembangkan guna membawa suatu perubahan pada masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Cassidy & Jakes dalam teorinya yaitu pemberdayaan merupakan bagian dari suatu program pengembangan masyarakat. Potensi masyarakat memiliki dampak langsung terhadap upaya pemberdayaan. Jika suatu masyarakat memiliki suatu pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sebagainya, maka masyarakat tersebut harus merasa lebih mampu untuk membuat perbedaan (Cassidy & Jakes, 2008).

Dengan demikian mengacu pada teori tersebut di atas, menurut hemat peneliti bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat serta menciptakan kepercayaan diri pada masyarakat yang bersangkutan bahwa potensi yang

dimiliki sangat bermanfaat dan membawa keuntungan bagi masyarakat yang bersangkutan.

Menurut hemat peneliti, BNN dan YCAB hendaknya dapat melakukan usaha-usaha pendekatan kepada para Pemuda Kampung Permata dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian atau memotivasi mereka agar terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mengutip seperti apa yang disampaikan oleh T. Hani Handoko (2003) motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Menurut Sudarwan Danim (2004) motivasi adalah setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia kerja atau di pelataran kehidupan pada umumnya. Menurut A. Anwar Prabu Mangkunegara (2002) motivasi adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja.

Terkait dengan teori-teori tersebut di atas, idealnya BNN dan LSM YCAB harus mampu menciptakan suatu kondisi dimana masyarakat dalam hal ini Para Pemuda Kampung Permata timbul rasa perhatian dan motivasinya akan adanya nilai manfaat dan keuntungan yang dibawa dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga mereka yakin bahwa kegiatan yang dilaksanakan dapat membawa manfaat dan keuntungan bagi mereka. Ife (1995) dalam teorinya mengatakan bahwa orang-orang akan berpartisipasi apabila merasakan suatu isu atau aktivitas menjadi penting. Begitu juga teori yang disampaikan oleh Peter M. Blau dalam teorinya "*Exchange Theory*" atau "Teori Pertukaran" mengatakan bahwa semakin banyak manfaat yang diduga akan diperoleh suatu pihak dari pihak lain melalui kegiatan tertentu, semakin kuat pihak itu akan terlibat dalam kegiatan (Ndraha, 1990).

Terkait dengan kedua teori tersebut di atas, menurut hemat penulis bahwa seseorang akan termotivasi untuk ikut terlibat dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat bila dalam kegiatan tersebut diduga atau

dirasakan ada nilai manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh. Sebaliknya, tanpa adanya nilai-nilai manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh, maka seseorang akan bersikap pasif terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

Menarik perhatian seseorang terhadap suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat membutuhkan suatu strategi, teknik dan taktik dalam berkomunikasi dengan orang-orang yang dimaksud (komunikan). Seorang komunikator diharapkan tidak hanya memiliki kemampuan berkomunikasi dan penguasaan akan isi pesan yang disampaikan kepada komunikan, tetapi seorang komunikator harus memiliki kredibilitas yang baik dihadapan komunikan, karena hal ini akan menumbuhkan kepercayaan komunikan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh komunikator. Mengutip dari teori yang disampaikan oleh Rogers dalam Sitompul (2002: 3) bahwa kredibilitas adalah tingkat dimana komunikator dipersepsi sebagai suatu kepercayaan dan kemampuan oleh penerima. Selanjutnya, Hovland dalam Krech (1982) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pesan yang disampaikan oleh komunikator yang tingkat kredibilitasnya tinggi akan lebih banyak memberi pengaruh kepada perubahan sikap dalam penerimaan pesan daripada jika disampaikan oleh komunikator yang tingkat kredibilitasnya rendah. Sedangkan Rakhmat dalam Sitompul (2002: 3) mengatakan bahwa dalam berkomunikasi yang berpengaruh terhadap komunikan bukan hanya apa yang disampaikan, tetapi juga keadaan komunikator secara keseluruhan. Jadi ketika suatu pesan disampaikan, komunikan tidak hanya mendengarkan apa yang dikatakan tetapi ia juga memperhatikan siapa yang mengatakan.

Terkait dengan teori-teori tersebut di atas, BNN dan YCAB dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata hendaknya membangun suatu pendekatan-pendekatan kepada para Pemuda Kampung Permata melalui komunikasi-komunikasi yang tepat dalam menyampaikan pesan yang dimaksud agar iujuan dari pesan yang disampaikan dapat terwujud. Pesan yang disampaikan harus menggunakan

seorang komunikator yang dinilai oleh komunikan atau para Pemuda Kampung Permata memiliki kredibilitas yang tinggi, sehingga membawa pengaruh kepada perubahan sikap dalam penerimaan pesan yang disampaikan oleh komunikator tersebut. Dan pada akhirnya para Pemuda Kampung Permata tertarik untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

## 5.2 Bentuk-bentuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang ideal

Seperti yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, menurut saudari Yulinda Pangabean tentang program-program BNN khususnya pada kegiatan pemberdayaan masyarakat seharusnya merupakan kegiatan-kegiatan yang berkesimbangan. Tujuannya adalah agar masyarakat yang menjalani kegiatan yang bersangkutan mendapatkan keahlian atau *skill* sampai pada tingkat yang lebih tinggi atau mahir dan tidak hanya sampai pada tingkat dasar saja. Sehingga peserta yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat menggunakan ketrampilannya atau keahliannya dalam bersaing dengan dunia luar, dan keahlian yang didapat dirasakan sangat bermanfaat bagi dirinya, khususnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Selain hal tersebut, BNN hendaknya dapat menyalurkan dan memberdayakan ketrampilan-ketrampilan yang sudah dimiliki oleh masyarakat kepada dunia usaha, agar ketrampilan-ketrampilan tersebut dapat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, hendaknya kegiatan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat dirasakan membawa nilai manfaat dan keuntungan bagi daerah yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Artinya kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat yang bersangkutan dapat tertarik dan termotivasi untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Dengan demikian kegiatan

pemberdayaan masyarakat mampu menyentuh pada sasaran yang tepat dan menarik perhatian masyarakat yang terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Menurut Yulinda Pangabean bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat pada daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya pada Kampung Permata harus dapat menyesuaikan diri dengan budaya atau yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Artinya, sebelum kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan pada daerah yang bersangkutan, BNN harus dapat mengetahui dan menyesuaikan diri pada budaya dan kebiasaan masyarakat, yaitu dengan mengetahui hal-hal apa yang menjadi kebiasaan masyarakat atau digemari oleh masyarakat. Misalkan, Masyarakat Kampung Permata menyukai atau hoby menyanyi, maka dari hal ini BNN dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung kebiasaan-kebiasaan mereka, yaitu dengan menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada Masyarakat Kampung Permata, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan lomba vokal atau menyanyi pada daerah tersebut, tetapi kegiatan yang dilaksanakan tidak berhenti pada saat itu saja, melainkan potensi yang sudah ada harus terus dikembangkan sampai masyarakat yang bersangkutan memiliki penghasilan dari kemampuan yang dimiliki pada dirinya sendiri, sehingga melalui hal tersebut masyarakat yang bersangkutan mengalami perubahan pola hidup, yang kebiasaan awalnya sering terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba menjadi masyarakat yang mampu menciptakan lingkungan bebas Narkoba, baik pada dirinya sendiri atau orang lain.

Selanjutnya Yulinda Pangabean mengatakan bahwa mengingat salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba disebabkan karena adanya tuntutan ekonomi, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat seharusnya dapat menyesuaikan dengan kondisi tersebut, yaitu dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat membantu permasalahan perekonomian pada masyarakat. Misalkan dengan mendirikan Koperasi

Simpan Pinjam, dimana peruntukkannya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha yang dapat mengatasi permasalahan perekonomian masyarakat. Dalam pelaksanaan pengoperasiannya BNN harus dapat memantau dan mengarahkan masyarakat yang telah memperoleh pinjaman agar memanfaatkan dana yang diperoleh dengan semaksimal mungkin, hal ini untuk menghindari penyalahgunaan dana pinjaman yang diperoleh masyarakat bersangkutan.

### **1.3 Upaya-upaya yang dapat dilakukan pada kegiatan Pemberdayaan Masyarakat**

Mengacu pada arah kebijakan dan strategi BNN pada bidang pemberdayaan masyarakat, yaitu melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba melalui strategi yang dilakukan dengan cara mendorong peran serta masyarakat dalam menciptakan lingkungan bebas Narkoba. Maka, kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan seharusnya merupakan kegiatan yang berkesinambungan atau berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan, agar masyarakat yang bersangkutan memiliki kemampuan yang maksimal bukan hanya pada kemampuan tingkat dasar saja, tetapi memiliki kemampuan sampai pada tingkat yang lebih tinggi atau mahir. Sehingga masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat memanfaatkan kemampuannya untuk bersaing pada dunia luar. Dengan demikian dari hal tersebut, masyarakat yang sudah berhasil dapat dijadikan contoh untuk masyarakat lainnya, dan lingkungan yang dijadikan sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat secara berangsur-angsur dapat bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, sehingga tercipta lingkungan bebas Narkoba di wilayah tersebut.

Mengingat sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba didominasi oleh para pemuda, maka upaya-upaya kegiatan

pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendekatan-pendekatan dengan menggunakan kegiatan-kegiatan yang dapat menarik perhatian mereka, yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membawa nilai manfaat dan keuntungan bagi mereka. Sehingga mereka dapat terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, upaya-upaya untuk menarik perhatian dari sasaran yang dituju yaitu para pemuda, hal yang harus menjadi perhatian dalam penyampaian pesan yang disampaikan harus melalui orang-orang atau komunikator yang memiliki kredibilitas tinggi, hal ini dimaksudkan agar penyampaian pesan yang disampaikan dapat didengar atau tersalurkan dengan efektif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dapat melakukan upaya-upaya penyesuaian diri dengan budaya atau kebiasaan masyarakat setempat. Artinya kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu melakukan pendekatan-pendekatan melalui budaya atau yang menjadi kebiasaan masyarakat setempat, sehingga potensi yang dimiliki oleh masyarakat setempat dapat digali dan dikembangkan. Dan pada akhirnya masyarakat setempat memiliki kemampuan yang berasal dari dalam dirinya sendiri dan dapat melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupannya.

Seperti telah disebutkan pada bagian sebelumnya, bahwa salah satu penyebab terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba disebabkan karena adanya faktor tuntutan ekonomi, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu melakukan upaya-upaya mengatasi permasalahan tuntutan ekonomi yang ada pada masyarakat setempat, seperti mendirikan koperasi simpan pinjam. Tujuannya adalah agar masyarakat yang memperoleh bantuan pinjaman dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri.



## **BAB 6**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Terkait dengan perumusan masalah yang disampaikan pada bab 1 dan mengacu pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada LSM YCAB, dan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta salah satu daerah yang menjadi sasaran program kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu Kampung Permata, maka melalui karya ilmiah ini peneliti memberikan beberapa kesimpulan dan saran. Adapun beberapa kesimpulan dan saran yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program-program pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata yang dilaksanakan oleh LSM YCAB dan BNN belum berjalan maksimal atau efektif sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN. Karena kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata yang dilaksanakan oleh LSM YCAB dan BNN dilaksanakan tidak secara berkesinambungan, sehingga manfaat yang dirasakan tidak maksimal.
2. Selain hal tersebut di atas, kegiatan pemberdayaan masyarakat belum mampu menyentuh pada seluruh sasaran, dalam hal ini Para Pemuda Kampung Permata, dimana sebagian besar Para Pemuda Kampung Permata terkontaminasi dengan penyalahgunaan Narkoba. Dengan demikian menurut hemat peneliti, bahwa untuk mengurangi jumlah penyalahgunaan di Kampung Permata belum dapat dirasakan. Sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan belum berjalan maksimal atau efektif sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN, dimana tujuan dari arah kebijakan dan strategi BNN adalah menciptakan lingkungan bebas Narkoba.

3. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Kampung Permata belum mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga kegiatan pemberdayaan masyarakat hanya sebatas diterimanya kegiatan tersebut oleh masyarakat serta tidak ada tindak lanjut dari kegiatan-kegiatan tersebut untuk dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup khususnya kebutuhan ekonomi masyarakat.
4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat belum mampu mengatasi persoalan-persoalan ekonomi yang ada pada masyarakat Kampung Permata, dimana sebagian besar masyarakat yang terjerumus dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba disebabkan karena adanya faktor tuntutan ekonomi.
5. Dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata dibutuhkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya, baik Depnaker, Depkes maupun Depsos yang diharapkan dapat membantu BNN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka.

## 6.2 Saran

Sedangkan beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata merupakan program-program yang berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang bersangkutan memiliki kemampuan yang maksimal, sehingga dapat membawa nilai manfaat dan keuntungan bagi mereka.
2. Hendaknya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata merupakan kegiatan yang dapat menciptakan daya tarik dan motivasi bagi Para Pemuda Kampung Permata bahwa kegiatan pemberdayaan

masyarakat membawa nilai manfaat dan keuntungan bagi mereka. Sehingga hasil yang diharapkan Para Pemuda Kampung Permata tertarik untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

3. Hendaknya kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat. Sehingga masyarakat yang bersangkutan dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya serta dapat mengatasi persoalan-persoalan kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan ekonomi.
4. Hendaknya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata merupakan kegiatan-kegiatan yang dapat mengatasi persoalan-persoalan kebutuhan ekonomi masyarakat, dimana sebagian besar penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba disebabkan karena adanya faktor tuntutan ekonomi pada masyarakat.
5. Hendaknya BNN dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata, melakukan upaya-upaya kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait lainnya, baik Depnaker, Depkes maupun Depsos. Hal ini dimaksudkan untuk membantu BNN sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi, khususnya pada Kampung Permata.

## DAFTAR REFERENSI

- Adair, John. (2008). *Kepemimpinan Yang Memotivasi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Agung. (2010). *Motivasi (Unsur, Tipe dan Tautannya dengan Kepemimpinan)*. [http://agungpia.multiply.com/journal/item/62/motivasi\\_unsur\\_tipe\\_dan\\_tautannya\\_dengan\\_Kepemimpinan](http://agungpia.multiply.com/journal/item/62/motivasi_unsur_tipe_dan_tautannya_dengan_Kepemimpinan).
- Al-Bantany. (2009). *Kumpulan Teori Efektivitas*. <http://al-bantany-112.blogspot.com/2009/11/kumpulan-teori-efektivitas.html>
- Praja, Ageng Nata. (2009). *Distorsi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Perspektif Civil Society di Kabupaten Grobogan*.
- BNN. (2008). *Survey Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2008*. Jakarta: Puslitbang & Info BNN.
- BNN. (2010). *Jurnal Data Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 2010*. Jakarta: BNN
- Djajendra. *Manajer Harusnya Motivator*. <http://kecerdasanmotivasi.wordpress.com/2011/01/11/manajer-harusnya-motivator/>
- Dewi, Sri Anggraini. *Teori Pengertian Manajemen*. <http://www.4shared.com/u/fxPAZb2>
- Gunadarma (n.d.). *Sistem Informasi Manajemen*. [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/sisteminformasimanajemen/bab2\\_teorimanajemen\\_danorganisasi.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/sisteminformasimanajemen/bab2_teorimanajemen_danorganisasi.pdf)
- Gunawan, Imam (2010). *Metode Kualitatif*. <http://masimamgun.blogspot.com/2010/07/metode-kualitatif.html>
- Hafis Muaddab (2009). *Pendekatan Strategi/Desain, Metode, Teknik, dan Taktik Pembelajaran*. <http://hafismuaddab.wordpress.com/2009/12/30/Pendekatan-strategidesain-metodeteknik-dan-taktik-pembelajaran/>
- Hamu, Sultan A.S. (2010) *Pengertian Komunikasi Menurut Para Ahli*. <http://www.soeltan.co.cc/2010/07/pengertian-komunikasi-menurut-para-ahli.html>
- Kosmo (2010). *Per Menit 5 Anak Indonesia Putus Sekolah*. <http://kosmo.vivanews.com/news/read/189798-per-menit-lima-anak-putus>

- Latif Thoyibie (2010), *Peranan Public Relation*. <http://komunikasi-Indonesia.org/2009/II/peranan-public-relations-2/>
- Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI-Press.
- Mita Omith (2008). *Komunikasi Dalam Organisasi*. <http://kuliah.dagdigdag.com/2008/07/22/komunikasi-dalam-organisasi-kdo/>
- Molcong, L.J. (1997). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Nasir, M. (1999). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmojo, Soekijo (2003). *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Kep/37/X/2010/BNN tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2010-214
- Kurniati, Renie (2010). *Macam-macam Teori Komunikasi*. <http://reniekurniati.blogspot.com/2010/11/macam-macam-teori-komunikasi.html>
- Setiawan, Joko (2009). *Komunikasi dan Relasi "Hakekat Relasi"*. <http://www.scribd.com/doc/18772004/Makul-Komunikasi-dan-Relasi-I-Hakekat-Relasi>
- Sudrajat, Akhmad (2008). *Pengertian Pendekatan Strategi, Metode, Teknik, Taktik dan Model Pembelajaran*. <http://makalahkumakalahmu.wordpress.com/2008/09/15/>
- Semiawan, Conny R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana.
- Teori Efektivitas. <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/teori-efektivitas.html>
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2007) *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo
- Tafiprios (n.d.). *Manajer dan Lingkungan Organisasi*. Jakarta: Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB
- Umar, Husein (2003). *Business An Introduction*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Wawan Junaidi (2010). *Teori-teori Kepemimpinan*. <http://wawan-junaidi.blogspot.com/2010/01/teori-teori-kepemimpinan.html>

Wahyuningsih (2005). *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Sarana Dan Prasarana Lingkungan di Kelurahan Salaman Moyo Kabupaten Semarang*. Semarang: Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.

YCAB (2010). *Tim Eksekutif*. <http://www.ycab.org/ID/executive.1.php>

YCAB (2010). *Visi dan Misi*. [http://www.ycab.org/ID/Vision Mision.php](http://www.ycab.org/ID/Vision_Mision.php)

YCAB (2010). *Membangun Sebuah Gaya Hidup Sehat*. [http://www.ycab.org/ID/healthy\\_lifestyle1.php](http://www.ycab.org/ID/healthy_lifestyle1.php)

YCAB (2010). *Keahlian Untuk Kemandirian*. [http://www.ycab.org/ID/building\\_Skills1.php](http://www.ycab.org/ID/building_Skills1.php)

YCAB (2010). *Membangun Kembali Komunitas*. <http://www.ycab.org/ID/communities3.php>

**Daftar Tabel 4.1**  
**Operasionalisasi Faktor-faktor yang akan diteliti.**

<b>NO</b>	<b>FAKTOR-FAKTOR</b>	<b>JENIS DATA</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>TEKNIK PENGUMPULAN DATA</b>
I	Input dalam Struktur Organisasi LSM			
	1. Profile LSM			
	▪ Visi dan Misi dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	▪ Program-program kegiatan	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	2. SDM	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	▪ Jumlah personel	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
	▪ Jumlah tenaga ahli	Primer	Informan	Wawancara
▪ Kualitas tenaga ahli				
3. Anggaran Kegiatan	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder	
▪ Anggaran dalam 1 tahun	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder	
▪ Anggaran dalam 1 program kegiatan	Primer	Informan	Wawancara	
▪ Sumber Anggaran				
II	Proses dalam pelaksanaan program kegiatan			
	1. Bentuk-bentuk kegiatan	Primer	Informan	Wawancara
	2. Metode pelaksanaan kegiatan	Primer	Informan	Wawancara
	3. Respon masyarakat	Primer	Informan	Wawancara
	4. Efektivitas & efisiensi metode yang digunakan	Primer	Informan	Wawancara
	5. Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan program kegiatan	Primer	Informan	Wawancara
	6. Laporan kegiatan	Sekunder	Dokumentasi	Studi data sekunder
7. Evaluasi terhadap capaian hasil	Primer	Informan	Wawancara	

	8. Tindak lanjut setelah program kegiatan dilaksanakan	Primer	Informan	Wawancara
III	Output	Primer	Informan	Wawancara
	1. sasaran bebas narkoba tercapai/tidak tercapai 2. persentase keberhasilan program	Primer	Informan	Wawancara
IV	Outcome	Primer	Informan	Wawancara
	1. Kepuasan masyarakat 2. persepsi masyarakat	Primer	Informan	Wawancara
V	Feedback	Primer	Informan	Wawancara
	1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan 2. upaya-upaya perbaikan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan	Primer	Informan	Wawancara

Berdasarkan tabel No. 1 maka dapat disusun pedoman wawancara sebagai berikut:

**Daftar Tabel 4.2**  
**Pedoman Wawancara**

NO	FAKTOR-FAKTOR	PERTANYAAN	INFORMAN
I	INPUT DALAM STRUKTUR ORGANISASI LSM 1. Profile LSM	1. Apa yang menjadi Visi dan Misi LSM YCAB dalam pencegahan bahaya Narkoba? 2. Kegiatan apa saja yang dijadikan program LSM YCAB dalam pencegahan bahaya Narkoba?	Sdri.Yulinda Panggabean
	2. SDM	1. Berapa jumlah personel LSM YCAB?	Sdri.Yulinda Panggabean



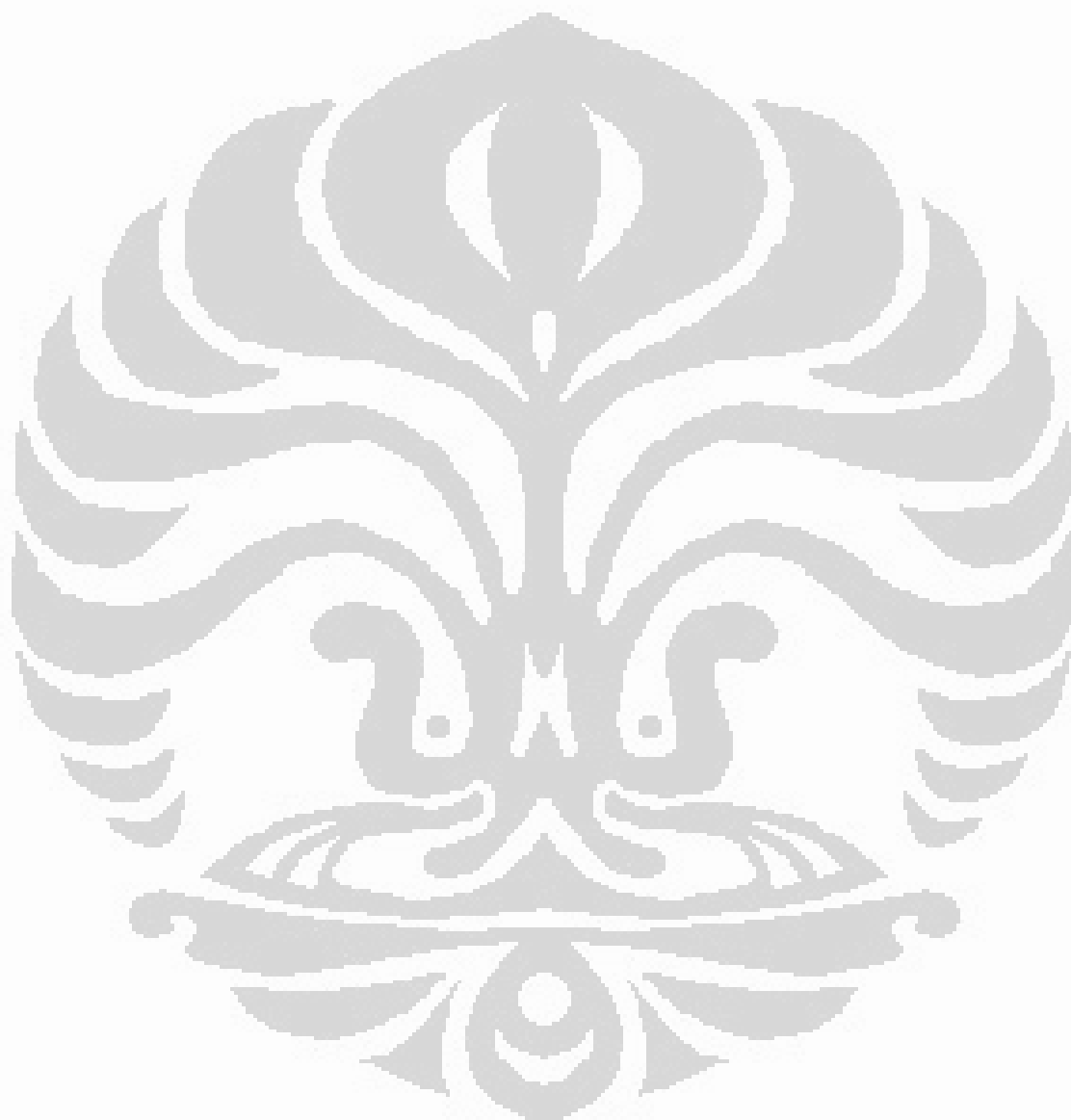
		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Berapa jumlah Tenaga Ahli yang dilibatkan?</li> <li>3. Bagaimana kualitas Tenaga Ahli?</li> <li>4. Bagaimana cara rekrutmen personel dan Tenaga Ahli dalam LSM YCAB?</li> </ol>	
	3. Anggaran Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa anggaran yang dibutuhkan dalam 1 (satu) tahun?</li> <li>2. Berapa anggaran yang dibutuhkan dalam 1 (satu) kegiatan?</li> <li>3. Berasal dari mana sumber anggaran kegiatan?</li> </ol>	Sdri. Yulinda Panggabean
II	Proses dalam pelaksanaan program kegiatan		
	1. Bentuk-bentuk kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kegiatan-kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh LSM YCAB dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?</li> <li>2. Apakah kegiatan-kegiatan tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Permata?</li> <li>3. Apakah kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata sudah sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN?</li> </ol>	Sdri. Yulinda Panggabean, Deputy Daya Mas BNN
	2. Metode pelaksanaan kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standarisasi kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat itu seperti apa?</li> <li>2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ideal seperti apa?</li> </ol>	Deputi Daya Mas BNN  Sdri. Yulinda Panggabean, Deputy Daya Mas BNN

3. Efektivitas dan efisiensi metode yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah sudah efektif dan efisien metode yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?</li> <li>2. Apa yang menjadi tolak ukur bahwa metode tersebut menjadi efektif dan efisien?</li> </ol>	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
4. Waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap pelaksanaan program kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk tiap-tiap pelaksanaan program kegiatan?</li> <li>2. Sehubungan dengan kegiatan yang dilaksanakan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi daerah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba?</li> </ol>	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
5. Hasil kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?</li> <li>2. Apakah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan bermanfaat bagi masyarakat Kampung Permata?</li> <li>3. Adakah pengurangan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Kampung Permata?</li> <li>4. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN</li> </ol>	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN  Deputi Daya Mas BNN
6. Evaluasi terhadap metode yang digunakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana menurut anda tentang metode kegiatan yang telah dilaksanakan</li> </ol>	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya

		terhadap Kampung Permata	Mas BNN
		2. Apakah metode kegiatan yang digunakan sudah sesuai dengan arah kebijakan dan strategi BNN	Deputi Daya Mas BNN
		3. Adakah masyarakat yang menerima dan menolak metode tersebut?	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
		4. Adakah peningkatan kesadaran tentang bahaya narkoba?	
		5. Adakah peningkatan status kehidupan masyarakat Kampung Permata?	
	7. Tindak lanjut setelah program kegiatan dilaksanakan	1. Adakah tindak lanjut setelah program kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan? 2. Apa bentuk tindak lanjut tersebut?	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
	8. Parameter keberhasilan metode yang digunakan	1. Apakah metode yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bisa dikatakan berhasil? Apa tolak ukurnya?	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
III	Output		
	1. Sasaran yang ingin dicapai	1. Siapakah yang menjadi sasaran dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata? 2. Apakah metode yang digunakan sudah tepat pada sasaran?	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
	2. Persentase keberhasilan program?	1. Berapa persentase keberhasilan program kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata? 2. Apakah bisa dikatakan berhasil?	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN

	<p>3. Controlling, monitoring, pendampingan terhadap daerah yang telah selesai menjalani program kegiatan.</p>	<p>1. Bagaimana controlling, monitoring, pendampingan terhadap daerah pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?</p>	<p>Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN</p>
	<p>4. Jumlah daerah yang telah berhasil menjalani program kegiatan.</p>	<p>1. Berapa jumlah daerah yang telah berhasil menjalani program kegiatan pemberdayaan masyarakat?</p>	<p>Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN</p>
IV	<p>Outcome</p> <p>1. Kepuasan masyarakat</p>	<p>1. Bagaimana pendapat anda tentang program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di daerah anda?</p> <p>2. Apakah metode yang digunakan sudah tepat? mengapa?</p> <p>3. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelayanan yang diberikan oleh LSM YCAB dan BNN?</p>	<p>Masyarakat K Permata</p>
	<p>2. Persepsi masyarakat</p>	<p>1. Apakah keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah anda? mengapa?</p>	<p>Masyarakat K Permata</p>
V	<p>Feedback</p> <p>1. Kendala-kendala dalam pelaksanaan kegiatan</p>	<p>1. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi di dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?</p>	<p>Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN</p>

	2. Upaya-upaya perbaikan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan	1. Upaya-upaya apa yang ideal dalam memperbaiki kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan?	Sdri.Yulinda Panggabean, Deputi Daya Mas BNN
--	--	---	--



## DAFTAR LAMPIRAN

### 1. Transkrip Wawancara dengan Staf LSM YCAB:

- a. Sehubungan dengan program BNN, kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh YCAB dalam program kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Permata?

Jawab:

Pada awalnya BNN masuk ke Kampung Permata untuk melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat, YCAB sudah ikut terlibat di dalamnya yaitu melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat persuasif, seperti melakukan kegiatan lomba seni menyanyi atau vokal group dan olahraga, pada saat itu Program BNN masih di dilaksanakan oleh Pus Pencegahan BNN. Untuk kegiatan kursus menjahit, bordir dan salon dilaksanakan sendiri oleh BNN melalui Pus Cegah BNN. Dan setelah adanya perubahan Struktur Organisasi BNN yang sekarang ini kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui Deputi Pemberdayaan Masyarakat, YCAB melaksanakan program pemberdayaan masyarakat melalui Pelatihan Komputer, sedangkan untuk kegiatan olahraga Putsal dan Basket dilaksanakan oleh BNN sendiri.

- b. Bagaimana menurut YCAB tentang pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Kampung Permata dan bagaimana sambutan mereka?

Jawab:

kegiatan yang dilaksanakan sudah cukup sesuai, baik yang melibatkan YCAB maupun yang dilaksanakan oleh BNN sendiri, hal ini terbukti dengan diterimannya BNN melakukan pendekatan-pendekatan kepada Masyarakat Kampung Permata yang pada saat itu dilaksanakan melalui

Pus Cegah BNN dan mereka sangat antusias terhadap kegiatan yang ditawarkan. Begitu juga setelah perubahan struktur organisasi BNN, dimana kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan melalui YCAB, khususnya pada kegiatan pelatihan komputer, maupun yang dilaksanakan oleh BNN sendiri baik olahraga putsal dan basket mereka menyambutnya dengan antusias.

- c. Bagaimana hasil dari kegiatan yang dilaksanakan, apakah sudah cukup efektif?

Jawab:

menurut kami dengan diterimanya BNN masuk ke Kampung Permata melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan hal tersebut sudah cukup efektif, karena sebelumnya mereka memandag BNN tidak jauh berbeda dengan aparat Kepolisian yang menurut mereka sangat dekat dengan tindakan-tindakan refresif, dimana sebelum BNN masuk ke Kampung Permata mereka selalu melakukan upaya-upaya perlawanan terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan memberikan perlindungan kepada para bandar Narkoba, namun ketika BNN masuk mereka sudah tidak lagi melakukan upaya-upaya perlawanan kepada aparat kepolisian untuk melindungi para bandar Narkoba. Untuk kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh YCAB hasil yang dapat dirasakan adalah adanya kemampuan peserta dari yang tidak tau mejadi tau atau mengerti.

- d. Metode kegiatan apa yang ideal, khususnya saat ini untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat?

Jawab:

hendaknya kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan yang berkesinambungan, hal ini dimaksudkan agar peserta yang bersangkutan mendapatkan kemampuan sampai pada jenjang yang lebih tinggi, tidak hanya sampai pada tingkat dasar saja, sehingga hasil

yang dirasakan sangat bermanfaat untuk mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka terutama dalam mencari pekerjaan atau dalam mengatasi kebutuhan ekonomi mereka. Selain hal tersebut, BNN hendaknya melakukan upaya-upaya kerjasama lintas sektoral dengan instansi terkait baik Depnaker, Depkes dan Depsos. Hal ini dimaksudkan untuk membantu BNN dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di Kampung Permata. Misalkan, BNN meminta bantuan kepada Depnaker untuk menyalurkan mereka yang sudah terampil dengan ketrampilan yang dimilikinya agar mendapatkan pekerjaan, hal ini dimaksudkan agar kepercayaan diri mereka tumbuh dan mereka dapat dijadikan contoh bagi masyarakat lainnya. Begitu pula dengan instansi terkait lainnya dapat melakukan hal-hal yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, khususnya yang terjadi di Kampung Permata.

- e. Adakah dampak yang dirasakan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap penurunan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba?

Jawab:

dampak yang dirasakan terhadap penurunan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba belum ada, karena kegiatan yang dimaksudkan, khususnya kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh YCAB bertujuan untuk mencegah atau menjaga yang belum terkontaminasi agar tetap tidak terkontaminasi dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

## 2. Transkrip Wawancara dengan Staf Deputi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh LSM YCAB dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Permata?



Jawab:

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB di Kampung Permata adalah kegiatan pelatihan komputer, namun sebelum adanya perubahan struktur organisasi BNN yang pada saat itu kegiatan BNN di Kampung Permata dilaksanakan oleh Pus Cegah BNN, dimana LSM YCAB sudah bekerjasama dengan BNN di Kampung Permata.

- a. Apakah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB melalui kegiatan pelatihan komputer sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bagaimana sambutan mereka?

Jawab:

Kegiatan pelatihan komputer yang dilaksanakan oleh YCAB sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana masyarakat sangat antusias terhadap kegiatan tersebut.

- b. Apakah hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh LSM YCAB sudah cukup efektif?

Jawab:

Hasil yang dirasakan cukup efektif karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, dimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat menjadi bertambah terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

- c. Apakah kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan berdampak kepada menurunnya jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba?

Jawab:

Diharapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba khususnya pada

Kampung Permata, dan dibutuhkan waktu untuk memulihkan kondisi tersebut serta waktu yang dibutuhkan tergantung dari kerawanan wilayah bersangkutan.

### 3. **Transkrip Wawancara dengan Masyarakat Kampung Permata**

- a. Bagaimana pendapat anda tentang program kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan bahaya Narkoba yang dilaksanakan di daerah anda?
  - 1) Agnes Pattiwael: menurut pendapat saya program kegiatan yang dilaksanakan di daerah kami sangat baik, karena respon dari masyarakat cukup baik, mereka antusias untuk mengikuti semua kegiatan, seperti Menjahit, Salon, Bordir dan Komputer untuk warga RW 07. Respon untuk kegiatan sangat positif dan mudah-mudahan dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya.
  - 2) Shenda Lohy: Pendapat saya, saya pribadi belum merasa puas, karena belum mengenai sasarannya terutama terhadap para penjual dan pemakai narkoba.
- b. Apakah metode yang digunakan sudah tepat? mengapa?
  - 1) Agnes Pattiwael: metode yang digunakan kurang tepat, karena diharapkan ada kelanjutan dari semua kegiatan yang ada, kemudian untuk semua program perlu disosialisasikan lebih awal, hendaknya juga lamanya kegiatan kalau bisa lebih dari 3 bulan.
  - 2) Shenda Lohy: Belum tepat, karena harus ada tindakan yang keras (Pengerebekan) bukan hanya melaksanakan kegiatan saja.
- c. Bagaimanakah pendapat anda tentang pelayanan yang diberikan oleh LSM YCAB dan BNN?

- 1) Agnes Pattiwael: cukup baik, tapi perlu ada kerjasama yang baik dan koordinasi diantara YCAB dan BNN sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.
  - 2) Shenda Lohy: menurut saya LSM YCAB sangat baik karena banyak memberikan bantuan dalam melaksanakan semua kegiatan, sedangkan untuk BNN belum puas karena banyak kekurangannya.
- d. Apakah keberadaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di daerah anda? mengapa?
- 1) Agnes Pattiwael: dari pendapat masyarakat terutama orang tua mereka sangat senang dan mereka mengatakan bahwa kalau bisa ditambah kegiatannya. Sedangkan anak remaja juga berkeinginan untuk mengikuti kegiatan olah raga dan seni, dampaknya belum terlalu kelihatan khususnya untuk para penjual atau pemakai narkoba, dengan berjalannya waktu diharapkan ada perubahan yang lebih baik.
  - 2) Shenda Lohy: belum, karena pihak BNN harus turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendekatan secara pribadi terhadap para pengguna narkotika sehingga benar-benar dirasakan hasilnya.